



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MANGROVE
DI DESA DUWET KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN
SITUBONDO (STUDI KASUS PADA LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT SIMPHONI AKAR RUMPUT)**

***THE COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH MANGROVE
IN DUWET VILLAGE, PANARUKAN SUB-DISTRICT,
SITUBONDO REGENCY
(A CASE STUDY ON NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
“SIMPHONI AKAR RUMPUT”)***

SKRIPSI

Oleh

**Fatimatus Zahra
NIM 140910301045**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MANGROVE
DI DESA DUWET KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN
SITUBONDO
(STUDI KASUS PADA LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT SIMPHONI AKAR RUMPUT)**

***THE COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH MANGROVE
IN DUWET VILLAGE, PANARUKAN SUB-DISTRICT,
SITUBONDO REGENCY
(A CASE STUDY ON NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
“SIMPHONI AKAR RUMPUT”)***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh
Fatimatus Zahra
NIM 140910301045

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah S.W.T yang telah memberika rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya pesembahkan kepada :

1. Ayahanda H. Syaiful Bahri dan Ibunda tercinta HJ. Hosniyah;
2. Saudara kandungku yakni Hamidah dan Hamidiyah;
3. Keluarga besar H. Sulaiman;
4. Guruku sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi;
5. Para sahabat tercinta;
6. Almamater Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(terjemahan Qur’at surat *AR-Ra’ad* ayat 11)*)

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau?”. Dia berfirman, “Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.(terjemahan

Qur’at surat *Al-Baqarah* ayat 30)**)

*)Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.250

***)Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.6

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

nama : Fatimatus Zahra

NIM : 140910301045

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Mangrove di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo (Studi kasus Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Simphoni Akar Rumpu)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Januari 2018

Yang menyatakan,

Fatimatus Zahra

NIM 140910301045

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MANGROVE
DI DESA DUWET KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN
SITUBONDO
(STUDI KASUS PADA LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT SIMPHONI AKAR RUMPUT)**

Oleh
Fatimatus Zahra
NIM 140910301045

Dosen Pembimbing

Arif, S.Sos., M.AP.
NIP 197603102003121003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Mangrove di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo (Studi Kasus Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Simphoni Akar Rumput) telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

hari, tanggal : Jum’at, 2 Februari 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Mafduz Sidiq, M.M
NIP. 196112111988021001

Arif, S.Sos., M.AP
NIP. 197603102003121003

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Purwowibowo, M.Si
NIP. 195902211984031001

Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A
NIP. 195806091985032003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP.195808101987021002

RINGKASAN

“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Mangrove di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo (Studi Kasus Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Simphoni Akar Rumput); Fatimatus Zahra, 140910301045; 151Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pemberdayaan masyarakat melalui mangrove di desa Duwet merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir setempat melalui kegiatan rehabilitasi mangrove untuk memperbaiki kondisi ekosistem pesisir yang rusak, kegiatan pelatihan produksi kerupuk kerang dan abon, bantuan modal bahan baku dan alat-alat produksi, pengoptimalan fungsi lembaga, serta kegiatan uji coba kopi rasa mangrove. Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat setempat. Tujuan penelitian adalah ingin mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui mangrove yang dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat Simphoni Akar Rumput (SAR).

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pemberdayaan masyarakat di desa Duwet melalui mangrove dengan kegiatan uji coba kopi rasa mangrove, pelatihan kewirausahaan produksi kerupuk kerang dan abon ikan tongkol, bantuan bahan baku dan alat-alat produksi, dan pengoptimalan fungsi lembaga setempat. Manfaat kegiatan pemberdayaan dapat diamati meliputi meningkatnya kemandirian dan orientasi kewirausahaan masyarakat, pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, membuka peluang kerja melalui produksi kerupuk kerang dan abon ikan tongkol, perbaikan kondisi sumber daya manusia, optimalnya fungsi lembaga sosial setempat seperti PKK, arisan, pengajian, dan lain sebagainya terutama saat kegiatan sosialisasi kegiatan pemberdayaan, peningkatan sumberdaya lingkungan dengan tumbuhnya mangrove sepanjang wilayah pesisir. Akan tetapi, kegiatan ini belum terlalu bermanfaat terhadap lembaga ekonomi yang ada sebab masyarakat saat ini masih memilih pihak patron dalam menyelesaikan masalah keuangan seperti kepala desa, pemilik modal besar, dan bank swasta yang memiliki persyaratan tertentu dengan risiko yang lebih besar dibanding lembaga ekonomi yang ada sehingga masih memerlukan pengoptimalan lembaga ekonomi setempat. Selain itu, masyarakat sudah dapat mengakses informasi dan kapital (modal), sedangkan akses terhadap teknologi dan pasar belum optimal diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat masih membutuhkan bimbingan strategi pemasaran yang baik untuk pemasaran produksi mereka.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah Hirobbila'lamiin penulis ucapkan ke hadirat Allah S.W.T karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir (Studi deskriptif di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo)”.Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Dr. Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
3. Arif S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini
4. Drs. Syech Hariyono, M.Si selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjadi mahasiswa
5. Bapak dan ibu dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa
6. Seluruh staf Akademik dan Kemahasiswaan, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya terutama kepada mas Risqi selaku operator akademik jurusan yang telah sabar membantu kelancaran administrasi penulis
7. Bapak Heru selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Simphoni Akar Rumput (SAR) dan seluruh anggotanya yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian
8. Ibu Nur Aisyah selaku kepala desa Duwet yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa Duwet, serta terimakasih kepada seluruh aparat pemerintah desa Duwet kecamatan

Panarukan kabupaten Situbondo yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian

9. Sahabat perjuangan Salma, Dian, Aida, Aldi, Sari, Triya, Erlina serta sahabat lainnya yang tidak disebutkan namanya yang telah memberikan dukungan terutama motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi
10. Ahul Adib, terimakasih untuk dukungannya selama ini untuk persahabatan yang tidak mengenal kata lelah untuk saling membantu dan mengingatkan pada kebaikan
11. Teman-teman jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2014 Universitas Jember
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Kesejahteraan Sosial pada khususnya sehingga menjadi sumbangsih kemajuan ilmu pengetahuan.

Jember, 23 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTARGAMBAR	xiv
DAFTARLAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	11
2.1.1 Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	13
2.1.2 Dasar dan Azas Pemberdayaan Masyarakat.....	16
2.1.3 Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	17
2.1.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.....	19
2.1.5 Model-model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.....	22
2.1.6 Indikator Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.....	23
2.2 Konsep Masyarakat Pesisir	24
2.2.1 Definisi dan Karakteristik Masyarakat Pesisir.....	24
2.2.2 Struktur Sosial Masyarakat Pesisir.....	27

2.2.3 Permasalahan Masyarakat Pesisir.....	29
2.3 Konsep Ekosistem Pesisir	31
2.3.1 Definisi Wilayah Pesisir.....	31
2.3.2 Karakteristik Wilayah Pesisir.....	32
2.3.3 Definisi Ekosistem Pesisir.....	33
2.3.4 Karakteristik Ekosistem Pesisir.....	34
2.4 Konsep Konservasi Mangrove.....	35
2.5 Konsep Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pesisir	40
2.5.1 Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pesisir.....	42
2.6 Konsep Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir.....	43
2.6.1 Definisi Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir.....	43
2.6.2 Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir.....	44
2.7 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	45
2.8 Kerangka Berpikir.....	49
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	52
3.1 Pendekatan Penelitian.....	52
3.2 Jenis Penelitian	53
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian	54
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5.1 Observasi.....	58
3.5.2 Wawancara.....	59
3.5.3 Dokumentasi.....	60
3.6 Teknik Analisis Data.....	61
3.7 Teknik Keabsahan Data	62
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1 Hasil Penelitian.....	64
4.1.1 Profil Lembaga Simphoni Akar Rumput	65
4.1.2 Profil Program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir.....	68
4.1.3 Kegiatan Pemberdayaan dalam Program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir	76
4.1.4 Manfaat Kegiatan Pemberdayaan dalam Program	

Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir terhadap Kehidupan Masyarakat desa Duwet.....	82
4.2 Pembahasan Penelitian	98
4.2.1 Pemberdayaan masyarakat melalui program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir.....	108
4.2.2 Manfaat Program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir sebagai Upaya Pemberdayaan	120
BAB 5. PENUTUP	148
5.1 Kesimpulan	148
5.2 Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.8 Kerangka Berpikir	52
4.1 Kegiatan Pelatihan Produksi Kerupuk Kerang dan Abon Ikan Tongkol.....	79
4.2 Sosialisasi Program pelaksana program di Lembaga Sosial Setempat.....	91
4.3Kondisi Rehabilitasi Mangrove di Pesisir Pantai Pathek desa Duwet Mangrove.....	105
4.4 Praktek Pelatihan Produksi Kerupuk Kerang dan Abon Ikan Tongkol.....	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Taksonomi Penelitian

Lampiran B. Guide Interview

Lampiran C. Transkrip Wawancara

Lampiran D. Dokumentasi

Lampiran E. Surat Ijin Penelitian Dari Lembaga Penelitian

Lampiran F. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran G. Surat Selesai Penelitian Dari Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya laut melimpah dengan tiga perempat wilayahnya merupakan wilayah laut. Hal ini menyebabkan sekitar 60% penduduk Indonesia hidup dan bertempat tinggal di wilayah pesisir dan sebanyak 42 kota serta 181 kabupaten berada di kawasan pesisir (Puspitaningsih, 2012:69). Berdasarkan konvensi hukum laut PBB ke tiga yaitu UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea*) di tahun 1982, luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,9 juta km² dengan garis pantai 95.161 km yang terdiri dari 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sedangkan, wilayah regional yakni wilayah propinsi Jawa Timur memiliki luas kawasan laut dan pesisir sekitar 75.700 km² apabila dihitung dengan 12 mil batas wilayah propinsi, sedang garis pantai propinsi Jawa Timur sepanjang 2.128 km yang aktif dan potensial. Beragam sumber daya alam mulai dari hutan bakau, padang lamun, terumbu karang, migas, sumber daya mineral hingga pantai berpasir putih tumbuh disepanjang pantai (Ridwan,2013: 24).

Masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar pesisir sangat memanfaatkan sumberdaya perikanan dan ekosistem pesisir yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, hal ini kurang selaras dengan pemeliharaan ekosistem pesisir sehingga mengakibatkan sebagian besar wilayah ekosistem terutama mangrove mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga berdampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan mengancam sumber pendapatan mereka yang sebagian besar masyarakatnya bergantung terhadap sumberdaya perikanan dan pesisir salah satunya dengan berjualan di pesisir pantai. Salah satu ancamannya adalah pengikisan lahan daratan akibat abrasi pantai sehingga mereka terancam tidak dapat melakukan aktivitas perikanan dan berjualan di pinggir pantai.

Sementara itu, kerusakan mangrove di pesisir wilayah Indonesia mengalami kerusakan yang cukup parah. Data Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI (2008) berdasarkan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Ditjen RLPS, Dephut (2000) menjelaskan kondisi hutan mangrove di Indonesia keseluruhan berjumlah 9.204.840.30 Ha, hanya sekitar 2.548.209,42 Hektar (Ha) yang masih dalam kondisi baik, 4.510.456,61 Ha dalam kondisi rusak sedang, dan 2.146.174,29 Ha dalam kondisi rusak (Puspitaningasih,2012:73). Kerusakan besar ekosistem hutan mangrove di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya informasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan sumber daya mangrove yang masih sangat terbatas sehingga belum dapat mendukung penataan ruang, pembinaan, pemanfaatan yang lestari, perlindungan, dan rehabilitasi (Purnobasuki, 2005:2).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki ekosistem hutan mangrove dengan kondisi di kawasan pesisir selatan Jatim berada dalam keadaan baik. Namun, di pesisir utara terutama di kabupaten Sampang dan Pamekasan ekosistem mangrove yang ada dalam kondisi buruk. Hal ini terbukti dengan data yang menyebutkan bahwa 18.500 Hektar mangrove di pesisir Jatim mengalami kerusakan yang mencapai 45 persen dan selama dua puluh tahun terakhir luas hutan mangrove di Jawa Timur berkurang hampir 1,1 juta Ha atau sekitar 75 persen (Data Badan Lingkungan Hidup Surabaya, 2012). Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, kondisi hutan mangrove yang mengkhawatirkan ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menanam dan melestarikan mangrove yang menyebabkan kawasan pesisir utara Jatim berkualitas buruk (Purnomo, 2012).

Salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki kerusakan ekosistem mangrove cukup parah adalah Situbondo. Kerusakan mangrove di wilayah tersebut berada di sepanjang jalan pantura kabupaten Situbondo. Hal ini salah satunya disebabkan dampak dari kebijakan pemerintah setempat yang hanya berorientasi terhadap sektor darat seperti pertanian dan peternakan yang diperparah dengan kondisi masyarakat pesisir Situbondo yang sebagian besar

berada dalam jeratan kemiskinan. Selain itu, kerusakan ekosistem hutan mangrove di Situbondo salah satunya di desa Duwet kecamatan Panarukan disebabkan oleh pengetahuan masyarakat yang sangat rendah mengenai manfaat dan rehabilitasi hutan mangrove (Bhirawa, 2016). Daerah yang mengalami kerusakan ekosistem mangrove parah berada sepanjang 10 km lebih di kecamatan Besuki hingga kecamatan Panarukan yang diakibatkan oleh limbah sampah organik dan anorganik, pembangunan tambak udang, dan pengaplingan permanen yang menjorok ke pantai hingga 100 meter di sekitar hutan mangrove yang berpotensi semakin merusak ekosistem mangrove di sepanjang pantura kabupaten Situbondo (Rian A, 2015). Kerusakan mangrove tersebut dikarenakan SK Bupati Situbondo No.81/1988 yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah tidak ada aktivitas sehingga meninggalkan lahan kosong diantaranya luas areal tambak intensif 996,1 Ha, semiintensif 42,9 Ha, tambak tradisional 265,2 Ha, dan perusahaan pembenihan udang windu sebanyak 38 unit, serta faktor bencana alam banjir bandang yang juga memperparah kerusakan ekosistem mangrove di tepi pantai jalan pantura Situbondo.

Kerusakan mangrove diwilayah pesisir khususnya di Situbondo berdampak terhadap terkikisnya lahan daratan yang dikarenakan oleh abrasi pantai sehingga menyebabkan degradasi atau penurunan fungsi lahan. Hal ini tentunya mengancam kehidupan masyarakat di wilayah sekitar pesisir yang bertempat tinggal di daratan pesisir dan menggantungkan kehidupannya melalui aktifitas melaut baik mencari ikan maupun usaha pemasaran produk perikanan. Akan tetapi, permasalahan pesisir tidak hanya disebabkan oleh kerusakan ekosistem mangrove melainkan pula oleh profesi masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan seringkali berhadapan dengan kondisi perekonomian yang lemah. Menurut data Bank Dunia sekitar 108,8 juta orang atau 49 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Dengan begitu, penduduk Indonesia yang sebagian besar berada di daerah pesisir dan pedesaan terancam mengalami kemiskinan dan jauh dari kondisi sejahtera. Data statistik menunjukkan bahwa upah riil harian yang diterima oleh seorang buruh tani dan buruh nelayan sangat rendah yakni sekitar Rp. 30.449, jumlah ini

lebih rendah dibanding upah buruh bangunan yang mencapai Rp. 48,301, per hari (Sanibo, 2008). Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian khusus sebab kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir yang berdampak terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak diantaranya pemerintah, tokoh agama, kepala desa, dan masyarakat harus saling bekerjasama agar upaya yang dilakukan berkelanjutan dan mendapatkan hasil optimal sehingga dapat menjamin kondisi kehidupan masyarakat pesisir.

Data Bappeda Jawa Timur menunjukkan bahwa terdapat 3.079.822 jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 9.049.461 Penduduk Miskin (PM). Dari 38 daerah yang ada di Jawa Timur terdapat 8 daerah yang mempunyai mempunyai tingkat kemiskinan di atas 4%, sedangkan 17 daerah lainnya dengan tingkat kemiskinan antara 2-3%, dan 13 daerah sisanya di bawah 2% tetapi masih di atas 1%, jika dipahami hanya enam daerah di Jawa Timur yang memiliki wilayah laut dengan tingkat kemiskinannya yang hanya mencapai 1-2% yakni kota Probolinggo, kota Pasuruan, kabupaten Tulungagung, kabupaten Trenggalek, dan kabupaten Pacitan (Linda, 2016). Hal yang sangat memprihatinkan adalah enam dari delapan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tersebut merupakan daerah pesisir yang sebenarnya memiliki sumber daya perikanan yang sangat melimpah namun masih belum optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jika dikaji lebih dalam terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat di pesisir di Jawa Timur salah satunya yaitu kebijakan pemerintah yang kurang memihak kepada masyarakat miskin. Banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan di pesisir bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai obyek bukan subyek. Demikian pula kondisi perikanan yang bergantung pada musim sangat berpengaruh pula pada tingkat pendapatan nelayan. Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan yang *bottom up*, artinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pesisir serta bentuk kebijakan atau program

yang dibuat harus mampu memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir.

Daerah yang memiliki sumberdaya laut melimpah namun belum dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut masih tinggi adalah kabupaten Situbondo. Menurut anggota Komisi II DPRD kabupaten Situbondo, Suhri SH yang menyatakan bahwa “tidak dilirikanya potensi perikanan dan kelautan itu, membuat masyarakat yang tinggal di daerah pantai masih hidup dalam hambatan kemiskinan. Beliau mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada masyarakat nelayan melalui program-program yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat pesisir Situbondo (Sanibo, 2008). Sebenarnya pemerintah kabupaten Situbondo telah menerima beberapa program untuk pesisir dari pemerintah pusat diantaranya yakni Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir merupakan program yang dibuat oleh Departemen Perikanan dan Kelautan dalam rangka pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), partisipasi masyarakat, penguatan modal dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pesisir, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan sasaran programnya meliputi peningkatan produksi dan produktifitas kelompok masyarakat pesisir, meningkatkan keterkaitan pola produksi, distribusi, perdagangan, dan pemasaran dalam lingkup masyarakat pesisir dengan pihak-pihak yang terkait, meningkatkan kemampuan dan peran serta pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan pengembangan komoditas terpilih, serta peningkatan partisipasi pemerintah di daerah dalam menunjang pelaksanaan Program Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

Beberapa bentuk Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir diantaranya yaitu Program Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3). Dalam program LEPP-M3 melibatkan koperasi nelayan

perbankan (Bank Mandiri dan BRI) dan Pegadaian. Dana program berasal dari pemerintah melalui program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) 2001 kabupaten Situbondo. Manfaat yang dirasakan oleh nelayan saat ini adalah terbukanya akses nelayan terhadap perbankan sehingga nelayan yang sebelumnya tidak memiliki jaminan untuk meminjam modal maka nelayan dapat meminjam uang cukup dengan mengurus surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sebagai jaminan hukum pidana apabila nelayan tidak melunasi pinjamannya. Saat ini, anggota yang terdaftar dalam program LEP-M3 di Situbondo berjumlah 187 orang yang 30% bekerja di bidang perdagangan ikan dan 70% di bidang penangkapan ikan yang tersebar di tiga desa yakni desa Ketah (kecamatan Suboh), desa Tanjung Pe-cinaan dan desa Semiring (kecamatan Mangaran).

Selain dari pemerintah kabupaten Situbondo, masyarakat di kawasan pesisir juga menerima program yang berasal dari luar negeri salah satunya didesa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo yang mendapatkan program yaitu Program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir. Program ini didanai oleh organisasi-organisasi yang berasal dari luar negeri yaitu lembaga *Mangroves For The Future* (MFF) yang berasal dari di Bangkok, Swedia, dan negara lain sebagai lembaga pendonor di program tersebut. Tujuan program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir adalah untuk melestarikan lingkungan hidup dan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat pesisir Situbondo terutama masyarakat di lokasi pelaksanaan program. Dalam program tersebut juga dilaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan pembuatan abon ikan tongkol dan pembuatan kerupuk berbahan dasar kerang yang berasal dari kawasan ekosistem hutan mangrove di lokasi pelaksanaan program yakni desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hasil observasi awal di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo dapat disimpulkan bahwa di lokasi tersebut terdapat ekosistem hutan mangrove yang mengalami kerusakan cukup parah sehingga berdampak terhadap kerusakan lahan sehingga lahan semakin sempit. Pada tahun 2016 dilaksanakan program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir yang

di pelopori oleh lembaga swadaya masyarakat Simphoni Akar Rumput (SAR) dan di danai oleh lembaga *Mangroves For The Future* (MFF) sebagai upaya untuk memperbaiki ekosistem hutan mangrove dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat setempat yakni Simphoni Akar Rumput (LSM SAR) melakukan kegiatan rehabilitasi tanaman mangrove dengan menanam bibit-bibit mangrove di sepanjang kawasan pesisir Situbondo yang berhasil terbentang antar mulai kawasan paling barat yakni kecamatan Banyuglugur (berbatasan dengan daerah Probolinggo) dan daerah wilayah paling timur di wilayah Banyuputih (berbatasan dengan Banyuwangi).

Jumlah bibit mangrove yang telah ditanam dalam program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir pada tahun 2016 sekitar 74.000 bibit pada lahan seluas 83 Hektar dengan melibatkan kelompok masyarakat desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo. Selain berguna terhadap pemeliharaan ekosistem pesisir, program mangrove ini bertujuan pula untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui upah pembibitan, penanaman dan pemeliharaan mangrove yang diberikan oleh lembaga pendonor yaitu lembaga *Mangroves For The Future* (MFF) kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi. Selain itu pula, program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang berbentuk kegiatan pelatihan pembuatan abon ikan tongkol dan kerupuk berbahan baku kerang. Dengan kegiatan ini, masyarakat diajak berpartisipasi untuk menjaga kelestarian lingkungan mangrove sambil mempromosikan produk lokal berbahan baku hasil tangkapan laut maupun olahan berbahan baku tanaman mangrove yang dapat diolah sebagai produk makanan yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hasil observasi awal peneliti juga menyimpulkan bahwa masyarakat pesisir di desa Duwet sudah memiliki akses terhadap sumber daya alam berupa sumberdaya perikanan yang melimpah dan tumbuhan mangrove yang banyak ditemukan di sepanjang pantai, akses partisipasi dan akses berupa keikutsertaan masyarakat dalam proses rehabilitasi mangrove, serta akses informasi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kepelatihan dalam program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir sudah dapat dijangkau oleh

masyarakat. Akan tetapi, akses terhadap pasar belum mampu dijangkau oleh masyarakat sehingga produk yang dihasilkan berupa kerupuk kerang, abon ikan tongkol belum dapat dipasarkan secara optimal kepada masyarakat luar. Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo menggunakan pendekatan kelembagaan. Selain itu, dalam kegiatan program rehabilitasi mangrove dan vegetasi pantai, lembaga yang terlibat adalah lembaga *Mangroves For The Future* (MFF) yang berpusat di Bangkok. Peran lembaga tersebut adalah sebagai pendonor dalam kegiatan konservasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat di desa Duwet. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang bergerak dibidang penyelamatan tanaman mangrove dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kaitan penelitian ini dengan disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial yaitu kondisi pesisir desa Duwet yang rusak ditandai dengan terkikisnya daratan yang diakibatkan oleh abrasi pantai sehingga membahayakan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, selain itu juga wilayah pesisir merupakan sumber mata pencaharian penduduk yang sebagian besar di wilayah tersebut berprofesi sebagai nelayan dan sangat menggantungkan pendapatan dari hasil menangkap ikan di laut. Oleh sebab itu maka perlu adanya kegiatan untuk memperbaiki kondisi ekosistem pesisir salah satunya yakni dengan memperbaiki kondisi ekosistem mangrove yang ada sehingga diharapkan dapat menjamin keberlangsungan hidup nelayan dan kesejahteraan sosial masyarakat nelayan di sekitar wilayah pesisir desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo. Salah satu kegiatan yang sudah diupayakan adalah program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir atas kerjasama LSM SAR dan Lembaga MFF. Dalam program tersebut juga dilaksanakan kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan usaha perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat pesisir sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar dan dapat terlibat dalam penentuan kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut Suharto (2014:58), kegiatan pemberdayaan bertujuan agar individu dan kelompok khususnya kelompok rentan dan lemah agar memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan

mengemukakan pendapat dan memperoleh barang-barang dan jasa yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo memiliki keterkaitan dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keberdayaan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat melalui pengoptimalan fungsi dan jasa ekosistem pesisir sekitar.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat pesisir dan pemanfaatan serta pemeliharaan ekosistem mangrove yang dilaksanakan oleh lembaga Simphoni Akar Rumput (SAR) melalui program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir atas kerjasama dengan lembaga *Mangroves For The Future* (MFF) sebagai lembaga pendonor di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui mangrove di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dengan cara mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui mangrove di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat melalui mangrove;
2. Melalui penelitian ini secara umum dapat memberikan tambahan ilmu yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu kesejahteraan sosial pada khususnya;

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi pemerintah, peneliti, maupun pihak-pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan mangrove.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan gambaran rangkaian teori yang disusun oleh peneliti dari berbagai definisi menurut para ahli. Tujuan dari adanya tinjauan pustaka adalah untuk memberikan gambaran kepada peneliti mengenai penelitian dan sebagai dasar acuan yang kokoh serta dapat dipertanggung jawabkan kegunaannya pada proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Menurut Sumadi Suryabrata dalam Sugiyono (2013:79), kajian pustaka dari suatu penelitian sering juga disebut sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Tujuan adanya kajian teori adalah untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat-pendapat para ahli sehingga dengan adanya kajian pustaka ini memberikan pemahaman bahwa suatu penelitian merupakan proses pengumpulan data secara ilmiah yang mengedepankan prinsip objektif dan mempunyai dasar yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan.

2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu upaya peningkatan kemampuan individu atau masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai derajat kesejahteraan. Kebutuhan hidup yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari kebutuhan ekonomi, sosial, pendidikan, perlindungan, dan lain sebagainya sehingga suatu individu berpotensi untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya. Ditinjau dari proses dan cara pelaksanaan, maka pemberdayaan didefinisikan sebagai berikut :

“Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang sehingga menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya” (Parsons dalam Suharto (1997:218)).

Dari definisi pemberdayaan menurut Parsons dalam Suharto (1997:218) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan baik yang diperoleh melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan lain sebagainya dengan tujuan agar suatu individu mampu mengontrol dan mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup mereka terutama instansi, organisasi, lembaga pemerintah maupun kehidupan orang lain yang menjadi perhatian dan mempengaruhi terhadap kehidupan mereka. Selain itu, Rappaport dalam Suharto (1997:220) menjelaskan mengenai pemberdayaan sebagai berikut :

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Fungsi pemberdayaan dalam hal ini digunakan sebagai cara peningkatan kemampuan individu atau kelompok sasaran agar mampu menguasai kehidupannya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan mencapai kondisi yang dianggap sejahtera oleh masyarakat.

Suharto (2014:58) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya agar individu atau kelompok khususnya kelompok yang rentan dan lemah agar memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, dan bebas mengemukakan pendapatnya sehingga mereka dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhannya, serta diharapkan mereka dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha yang kompleks mencakup upaya pemenuhan seluruh kebutuhan kelompok sasaran baik kebutuhan dasar, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan sosial individu atau kelompok sasaran agar dapat menguasai kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Sementara itu Soetomo (2015:88-89) menyatakan bahwa masyarakat perlu diberdayakan agar dapat memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan. Tujuan dari pemberdayaan yang dimaksud adalah meningkatkan kemampuan atau kekuatan yang ada dalam diri masyarakat melalui penggalian dan pengembangan potensi yang dimiliki sehingga mampu menciptakan kesempatan-kesempatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pandangan Kartasmita (dalam Huraerah,2008:87), upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan dengan menciptakan suasana atau iklim yang dapat memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Hal mendasar yang harus dipahami dalam hal ini adalah bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi masing-masing yang dibawa sejak lahir dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, proses pemberdayaan menjadi penting dalam upaya membangun daya atau potensi yang dimiliki masyarakat melalui motivasi dan pengembangan kesadaran akan potensi dengan berbagai upaya yang nyata dan mampu memberikan hasil yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, serta mampu mengubah kehidupan masyarakat atau kelompok sasaran kearah yang lebih baik.

2.1.1 Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki kaidah atau prinsip yang harus dipahami sebelum melaksanakan upaya pemberdayaan agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Suharto (1997:216-217) prinsip pemberdayaan berdasarkan perspektif pekerjaan sosial diantaranya terdiri dari :

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner. Maksudnya adalah suatu upaya pemberdayaan tidak akan mendapat respon positif dan partisipasi aktif dari masyarakat jika tujuan dan manfaat dari proses pemberdayaan belum dapat dipahami secara baik oleh masyarakat sehingga diperlukan kegiatan sosialisasi sebelum kegiatan pemberdayaan dilaksanakan;
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk menjangkau sumber-

sumber produktif yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif pekerja sosial, subjek atau sasaran intervensi bukan dipandang sebagai suatu kelompok yang tidak dapat melakukan apapun namun lebih dipandang sebagai suatu subjek yang memiliki potensi hanya saja memerlukan pekerja sosial untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri mereka;

- c. Pekerja sosial harus mampu menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat agar mampu melihat diri mereka sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan. Fungsi pekerja sosial dalam hal ini adalah sebagai penggali potensi yang ada dalam diri masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan keyakinan pada diri mereka bahwa mereka mampu untuk melakukan suatu upaya perubahan disekitar mereka;
- d. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri. Dalam artian bahwa masyarakat harus diberikan peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam merumuskan tujuan, cara, dan hasil yang diharapkan dari upaya pemberdayaan yang akan dilaksanakan;
- e. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan. Hal ini dikarenakan suatu pengetahuan dapat mempengaruhi tindakan bagi perubahan masyarakat. Fungsi pekerja sosial adalah memastikan bahwa masyarakat benar-benar memiliki kesadaran bahwa mereka adalah subjek pemberdayaan yang mempunyai hak untuk menentukan dan berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan mereka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan murni kesadaran dari subjek pemberdayaan;
- f. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber secara efektif. Dalam artian bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan kerjasama dengan sumber yang dianggap mampu memberikan solusi bagi pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat, salah satunya adalah akses terhadap lembaga pemerintah, keluarga, dan sebagainya.
- g. Proses pemberdayaan harus bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif. Hal ini dikarenakan suatu permasalahan selalu memiliki beragam

solusi yang dapat dipilih dengan menyesuaikan kebutuhan kebutuhan subjek pemberdayaan atau masyarakat.

Selain prinsip diatas, pemberdayaan juga memiliki tujuan utama yakni untuk memperkuat eksistensi kelembagaan sosial ekonomi yang ada dan meningkatkan kualitas serta wawasan sumber daya manusia sehingga masyarakat memiliki kemampuan mengelola potensi sumberdaya pembangunan untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial. Tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif jika masyarakat memiliki kemampuan bekerjasama yang baik diantara mereka, saling peduli, dan mau berkorban, serta bertanggung jawab terhadap masa depan pembangunan di wilayahnya (Kusnadi, 2006:6). Dalam rangka ini diperlukan adanya upaya penyadaran masalah kepada masyarakat sebelum proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan. Sedangkan menurut Chabib Soleh (2014:81), tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan kualitas hidup tersebut bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, melainkan juga aspek fisik, mental, politik, keamanan, dan sosial budaya.

Maka dari itu, untuk mencapai beberapa tujuan tersebut maka terdapat beberapa sasaran yang harus dicapai yakni : perbaikan kelembagaan, perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan, perbaikan lingkungan hidup, perbaikan akses masyarakat terhadap sumber-sumber produktif, perbaikan tindakan, perbaikan usaha produktif, dan perbaikan perbaikan bidang lainnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai sasarannya.

2.1.2 Dasar dan Azas Pemberdayaan Masyarakat

Segala sesuatu yang direncanakan harus memiliki dasar dan azas yang kuat agar upaya yang dilakukan dapat terealisasi dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, begitu pula dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Adi (2005:72), pemberdayaan didasari oleh pendekatan yang partisipatoris, humanis, dan emansipatoris yang berpijak pada beberapa

prinsip yakni prinsip bekerja bersama berperan serta, membantu masyarakat agar mereka bisa membantu dirinya sendiri dan orang lain, kegiatan diarahkan bukan saja untuk mencapai hasil melainkan juga agar menguasai prosesnya, dan perubahan sosial di masyarakat. Sedangkan menurut Chabib Soleh (2014:77), pemberdayaan masyarakat didasarkan atas anggapan dasar atau pemikiran bahwa masyarakat perlu diberdayakan, bahkan masyarakat sendiri harus memiliki kesadaran bahwa mereka perlu memberdayakan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan dengan adanya kesadaran, maka akan menarik partisipasi aktif dari masyarakat yang sadar bahwa mereka memerlukan proses pemberdayaan tersebut sehingga tujuan yang diharapkan dalam pemberdayaan akan mudah tercapai.

Pemberdayaan masyarakat juga didasarkan atas falsafah kepemimpinan Pancasila sebagaimana yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro dalam Chabib Sholeh (2014) yaitu :

- 1) *Ing ngarso asung tulodo*, yang artinya seorang pemimpin atau aparat pemerintah harus menjadi contoh atau suri tauladan yang baik bagi masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat melalui pemberian contoh yang nyata akan lebih mudah difahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat;
- 2) *Ing mandyo mangun karso*, artinya seorang pemimpin atau aparat pemerintah harus mampu menumbuhkan prakarsa atau inisiatif dan kreativitas serta memberikan semangat agar masyarakat tidak takut untuk mencoba hal yang baru;
- 3) *Tut wuri handayani*, artinya seorang pemimpin atau aparat pemerintah harus mau dan mampu menghargai serta mengikuti keinginan masyarakat, sepanjang tidak keluar dari prinsip dan tujuan yang akan dicapai, yakni memperbaiki kualitas hidupnya.

Menurut Chabib Soleh (2014:83) pemberdayaan masyarakat juga harus dilaksanakan berdasarkan beberapa azas diantaranya : a) azas kesukarelaan, b) azas kemandirian, c) azas keswadayaan d) azas keikutsertaan e) azas kesetaraan, f) azas musyawarah g) azas keterbukaan h) azas kebersamaan. Beberapa azas tersebut harus benar-benar ada dan dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan

masyarakat agar nantinya tujuan pemberdayaan dapat dengan mudah dicapai. Sebagai contohnya adalah pelaksanaan azas keikutsertaan, yang dimaksud azas tersebut adalah semua pihak-pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan harus ikut serta dalam seluruh proses pemberdayaan sesuai dengan porsi tugas dan fungsinya masing-masing tanpa melupakan azas kesukarelaan, azas kesetaraan dan azas musyawarah, azas keterbukaan, dan azas kebersamaan yang nantinya diharapkan dapat mencapai kemandirian dan keswadayaan subjek pemberdayaan.

2.1.3 Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa lingkup kegiatan yang ada dalam masyarakat memiliki potensi dalam peningkatan kemampuan individu dan kelompok masyarakat sehingga dapat dioptimalkan saat upaya dan proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan. Beberapa lingkup kegiatan pemberdayaan yang ada dalam masyarakat terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan (Chabib Sholeh, 2014:86-90). Lingkup kegiatan pemberdayaan yang pertama adalah bina manusia yang dalam hal ini merupakan aspek pokok dalam kegiatan pemberdayaan, karena pada dasarnya pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lingkup kegiatan yang kedua adalah bina usaha yang merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan masyarakat karena disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : bina manusia yang tidak dapat memberikan keuntungan secara ekonomi tidak akan direspon secara positif oleh masyarakat miskin yang menjadi sasarannya, pemberdayaan dalam bentuk apapun yang tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka tidak akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi secara aktif. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan yang berhubungan dengan bina usaha antara misalnya pemilihan jenis usaha, pelatihan kemampuan usaha, pelatihan mengenai informasi dan bisnis, pengembangan jaringan usaha, dan lain sebagainya.

Lingkup kegiatan yang ketiga adalah bina lingkungan. Bina lingkungan ini didasari oleh pemikiran bahwa kelestarian lingkungan fisik dan lingkungan sosial

dinilai akan sangat menentukan keberlangsungan kegiatan pembangunan, investasi, maupun operasi terutama yang berhubungan dengan ketersediaan bahan baku sehingga lingkungan sekitar baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sangat penting untuk dijaga keberlangsungan dan keseimbangannya untuk memudahkan tercapainya tujuan pemberdayaan yang diharapkan. Lingkup kegiatan pemberdayaan yang terakhir adalah bina kelembagaan. Lembaga dianggap penting dalam upaya pemberdayaan karena lembaga merupakan suatu wadah kerjasama untuk mencapai beberapa tujuan bersama, termasuk sebagai wadah pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Maka dari itu, kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga yang ada di masyarakat sangat membantu proses pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya dalam masyarakat pesisir desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo sebagai lokasi pelaksanaan program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir juga melakukan pengoptimalan lembaga yang ada terutama lembaga sosial masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan sosialisasi program yang memanfaatkan lembaga sosial setempat diantaranya arisan, pengajian, dan lain sebagainya.

2.1.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Di Indonesia, nelayan masih dipandang sebagai kelompok masyarakat yang masih jauh dari kata sejahtera, sehingga diperlukan adanya kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kemampuan nelayan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka, serta dapat memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Definisi pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut ini :

“Pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk

mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan” (Kusnadi, 2009:30).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam hal ini adalah agar mereka mampu mengelola dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada. Dalam hal ini adalah sumber daya perikanan dan pesisir sehingga diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kesejahteraan sosial. Namun dengan catatan masyarakat pesisir harus mampu merawat dan memelihara sumberdaya yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, terdapat dua dimensi pokok yang perlu diperhatikan yakni dimensi kultural dan dimensi struktural (Arif Satria, 2015:129-130). Dimensi kultural diantaranya berhubungan dengan perubahan perilaku masyarakat di bidang ekonomi, orientasi pendidikan, sikap terhadap perkembangan teknologi, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan yang bersifat kultural dalam masyarakat. Perilaku kemiskinan kultural misalnya adalah pola perilaku konsumtif, rendahnya kesadaran untuk menabung dan berinvestasi, serta sikap kurang peduli terhadap pendidikan formal. Sedangkan, dimensi struktural meliputi upaya perbaikan struktur sosial masyarakat sehingga mengakibatkan adanya penguatan solidaritas antar masyarakat nelayan. Salah satunya dengan mengumpulkannya dalam suatu wadah organisasi yang sama untuk mencapai kepentingan sosial nelayan yang diharapkan tumbuhnya rasa persaudaraan di antara mereka sehingga dapat menghargai satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

Pencapaian tujuan pemberdayaan juga tidak terlepas dari adanya akses terhadap sumber-sumber yang dibutuhkan dalam masyarakat. Beberapa akses yang dibutuhkan diantaranya meliputi akses terhadap sumberdaya alam, akses terhadap partisipasi, akses terhadap pasar, serta akses terhadap informasi dan pengetahuan. Selain beberapa akses pemberdayaan masyarakat tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah prinsip-prinsip pemberdayaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pencapaian tujuan. Beberapa prinsip tersebut terdiri dari : prinsip tujuan, prinsip pengetahuan dan penguatan nilai lokal, prinsip

keberlanjutan, prinsip ketepatan kelompok sasaran, prinsip kesetaraan gender (Satria, 2015: 129-131).

Prinsip yang pertama dalam pemberdayaan adalah prinsip tujuan, maksudnya dalam upaya pemberdayaan, nelayan diposisikan sebagai subjek dengan tujuan utama untuk meningkatkan berdayaan mereka dan yang paling penting adalah mengedepankan asumsi bahwa nelayan memiliki potensi atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan kualitas hidup mereka. Sedangkan posisi pelaksana atau yang biasa disebut pekerja sosial dalam hal ini hanya sebagai fasilitator. Maka dari itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pekerja sosial yaitu untuk membantu para nelayan agar mereka dapat membantu dirinya sendiri (*to help people to help themselves*). Prinsip yang kedua adalah prinsip pengetahuan dan penguatan nilai lokal, maksudnya adalah sebelum melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat nelayan, pelaksana pemberdayaan harus menyadari bahwa dalam masyarakat memiliki banyak nilai lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial yang berpotensi untuk kemajuan masyarakat nelayan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip keberlanjutan, prinsi yang satu ini tidak jarang diabaikan dalam pemberdayaan masyarakat karena masih kuatnya sistem kontrak dalam setiap aktivitas pemberdayaan dan sifatnya yang hanya sesaat serta tidak berkelanjutan mengakibatkan kegiatan pemberdayaan hanya sebatas formalitas saja sehingga tidak berlanjut dan benar-benar bermanfaat bagi kehidupan subjek pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan masyarakat nelayan perlu diperhatikan prinsip keberlanjutan dengan mengubah sistem administrasi proyek yang terkait dengan pemberdayaan sehingga program pemberdayaan bisa berjalan dengan efektif, tanpa ada batasan-batasan administrasi yang sering menghambat.

Sedangkan prinsip selanjutnya adalah prinsip ketepatan kelompok sasaran. Menurut Chambers (1987:135), yang sering didatangi oleh para tim pelaksana adalah justru para elit desa yang sebenarnya jauh dari persoalan. Hal ini menyebabkan pelaksana kegiatan melupakan masyarakat nelayan miskin yang memang seharusnya menjadi sasaran utama kegiatan dikarenakan tidak dapat menyampaikan suaranya dibanding dengan para elit desa yang lebih bisa

berkomunikasi. Akibatnya para elit desa sering dianggap sebagai sasaran pokok dalam program kegiatan dan menganggap suara mereka adalah suara masyarakat kecil. Hal ini mengakibatkan program pemberdayaan hanya menyentuh elit nelayan dan bukan nelayan strata bawah yang memang merasakan banyak masalah dan membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya program pemberdayaan masyarakat nelayan saat ini berorientasi terhadap kelompok sasaran yang tepat dan benar-benar membutuhkan pemberdayaan yakni kelompok nelayan yang berada dalam strata bawah atau nelayan miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Prinsip yang terakhir adalah prinsip kesetaraan gender. Pada umumnya, perempuan sering terabaikan dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan penyuluh laki-laki (Chambers,1987:78). Hal ini sangatlah tidak tepat dikarenakan fakta yang ada dalam masyarakat nelayan menunjukkan kuatnya peran perempuan atau istri nelayan dalam kegiatan perekonomian. Oleh sebab itu, sasaran yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan harus pula mencakup perempuan pesisir atau istri-istri nelayan dan memosisikannya sebagai subjek pemberdayaan yang setara dengan posisi laki-laki dan memiliki hak untuk berdiskusi serta diajak kerjasama untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

2.1.5 Model-model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir seringkali mengalami persoalan yang tidak dapat diselesaikan sendiri dan membutuhkan pihak luar untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Beberapa permasalahan wilayah pesisir yang sering dijumpai terutama di wilayah pesisir Indonesia meliputi : pencemaran, kerusakan habitat pantai, pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan, abrasi pantai, konversi kawasan lindung dan bencana alam Dahuri (2001:56). Permasalahan-permasalahan tersebut sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas kegiatan manusia baik yang tinggal dalam maupun yang berada di luar kawasan sehingga kegiatan pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan kelembagaan merupakan salah satu strategi untuk mengatasinya. Beberapa keuntungan menggunakan pendekatan kelembagaan yaitu memperbesar kemampuan sumberdaya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki oleh masyarakat, meningkatkan posisi tawar

kolektif dalam mengakses modal, pasar, teknologi, dan kebijakan, mengembangkan kemampuan koordinasi dan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif untuk mendukung dinamika ekonomi kawasan, serta memudahkan pengontrolan terhadap perjalanan usaha ekonomi bersama.

Pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan kelembagaan salah satunya adalah program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dibuat oleh Departemen Perikanan dan Kelautan dalam rangka pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir pada tahun 2001. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), partisipasi masyarakat, penguatan modal dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pesisir, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan sasaran programnya meliputi peningkatan produksi dan produktifitas kelompok masyarakat pesisir, meningkatkan keterkaitan pola produksi, distribusi, perdagangan, dan pemasaran dalam lingkup masyarakat pesisir dengan pihak-pihak yang terkait, meningkatkan kemampuan dan peran serta pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan pengembangan komoditas terpilih, serta peningkatan partisipasi pemerintah di daerah dalam menunjang pelaksanaan Program Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

2.1.6 Indikator Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Indikator pemberdayaan masyarakat pesisir digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir. Berikut ini beberapa indikator kualitatif yang menandai bahwa suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan (Kusnadi, 2007 : 27-29) :

- a) Tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi : individu, rumah tangga, dan masyarakat yang diwujudkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - (1) kemandirian ekonomi berkembang dan orientasi kewirausahaan meningkat,
 - (2) nilai tabungan dan investasi bertambah,

- (3) kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, optimal, dan berkelanjutan,
- (4) kondisi kualitas sumber daya manusia berkembang baik;
- b) kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada dapat berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil-kontinuitas,
- c) kelembagaan sosial berfungsi dengan baik sebagai instrumen pembangunan lokal
- d) potensi sumberdaya lingkungan sebagai basis kehidupan masyarakat pesisir terpelihara kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan
- e) berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi : informasi, kapital, pasar, dan teknologi;
- f) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir;
- g) Kawasan pesisir menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

Penelitian ini nantinya akan menjadikan konsep indikator kualitatif yang menandai masyarakat nelayan memiliki keberdayaan menurut Kusnadi (2007: 27-29) sebagai referensi peneliti dalam menganalisis hasil penelitian.

2.2 Konsep Masyarakat Pesisir

Keberadaan masyarakat pesisir terutama di Indonesia seringkali dipandang sebagai suatu masyarakat yang kehidupannya hanya dihabiskan untuk aktivitas-aktivitas melaut sehingga kurang dapat mengikuti perubahan dunia luar. Hal ini juga mengakibatkan masyarakat pesisir yang sebagian besar merupakan nelayan dilihat sebagai suatu kelompok masyarakat yang tradisional dan jauh dari perubahan. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional harus dikedepankan oleh pihak-pihak yang terkait sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Data

menyebutkan bahwa sekitar 60% penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir dan sebanyak 42 kota serta 181 kabupaten berada di kawasan pesisir (Puspitaningsih, 2012:69). Oleh karena itu, adanya peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir nantinya akan berdampak pula terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan angka kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

2.2.1 Definisi dan Karakteristik Masyarakat Pesisir

Masyarakat nelayan di definisikan sebagai kesatuan sosial kolektif masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dengan mata pencahariannya menangkap ikan di laut yang pola perilakunya diikat oleh sistem nilai budaya yang berlaku, memiliki identitas bersama dan batas-batas kesatuan sosial, struktur sosial yang mantap, dan masyarakat terbentuk karena sejarah sosial yang sama (Kusnadi, 2009:37). Sementara itu, kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir di berbagai kawasan secara umum ditandai oleh adanya beberapa ciri misalnya : kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduk hanya lulusan sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau kapasitas berorganisasi masyarakat. Hal-hal seperti ini merupakan hambatan potensial bagi masyarakat pesisir untuk mendorong dinamika pembangunan di wilayahnya. Akibatnya, sering terjadi kelemahan posisi masyarakat pesisir dengan pihak-pihak lain di luar kawasan pesisir yang mengakibatkan mereka kurang memiliki kemampuan mengembangkan kapasitas dirinya dan organisasi atau kelembagaan sosial yang dimiliki sebagai sarana aktualisasi dalam membangun wilayahnya (Kusnadi, 2006a:91-92).

Selain itu, dalam Arif Satria (2015:10) disebutkan bahwa dalam membahas mengenai masyarakat pesisir alangkah baiknya untuk menempatkannya sebagai bagian dari kesinambungan peradaban sebagaimana sering diungkapkan Redifield (1941) dalam Koentjaraningrat (1990) tipe-tipe komunitas, yaitu kota, kota kecil, desa petani, dan desa terisolasi dengan setiap komunitas tersebut memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda satu sama

lain. Dari klasifikasi tersebut, masyarakat pesisir berada pada setiap tipe komunitas, namun di Indonesia kebanyakan masyarakat pesisir merupakan representasi tipe komunitas desa petani dan desa terisolasi. Akan tetapi, pada umumnya, masyarakat pesisir yang bergerak di bidang kegiatan perikanan mencirikan tipe kebudayaan rakyat yang juga berada dalam masyarakat petani perdesaan tetapi juga ada penduduk kota yang bersifat rakyat umum, yaitu penduduk yang tidak termasuk golongan elit atau yang berkedudukan tinggi.

Maka dari itu dalam konteks masyarakat pesisir, masyarakat desa terisolasi (masyarakat pulau kecil) dan masyarakat desa pantai dapat merupakan gambaran wujud komunitas kecil itu yang memiliki ciri sebagai berikut: mempunyai identitas yang khas, terdiri atas sejumlah penduduk dengan jumlah yang cukup terbatas sehingga masih saling mengenal sebagai individu yang berkepribadian, bersikap seragam dengan diferensiasi terbatas, dan kebutuhan hidup penduduknya sangat terbatas sehingga semua dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung pada pasaran luar. Dengan demikian, tipe komunitas kecil pada masyarakat pesisir merupakan sistem ekologi yang dapat menggambarkan betapa kuatnya interaksi antara masyarakat pesisir dengan lingkungan pesisir dan laut (Arif Satria, 2015:13). Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat yang ada pada tipe komunitas kecil mengalami ketergantungan terhadap ekosistem pesisir yang ada sehingga perbaikan dan pemeliharaan ekosistem pesisir harus terus berlanjut.

Selain itu, karakteristik masyarakat pesisir dapat dipahami dari beberapa aspek sebagai berikut (Satria, 2015:15-22): Sistem pengetahuan yakni pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan umumnya didapatkan dari warisan orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Adanya pengetahuan tersebut yang menjadi penyokong pendapatan ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Karakteristik yang kedua adalah sistem kepercayaan nelayan yang secara teologis masih memiliki kepercayaan cukup kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis sehingga diperlukan adanya perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan untuk menjaga keselamatan dan melimpahnya hasil tangkapan. Tidak jarang dalam beberapa wilayah pesisir di Indonesia sering mengadakan

acara-acara dan ritual tertentu untuk menghormati penjaga laut sehingga diharapkan masyarakat mendapatkan kelancaran ketika melaut dan mendapatkan hasil yang melimpah sehingga mampu menunjang kehidupannya. Karakteristik selanjutnya adalah peran perempuan nelayan yang pada umumnya tidak hanya bergelut dengan urusan domestik rumah tangga, namun selain itu juga tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, baik dalam penangkapan di perairan dangkal, pengolahan ikan, maupun kegiatan jasa dan perdagangan. Hal ini sebanding dengan pernyataan Pollnac (1988:78), bahwa pembagian kerja keluarga nelayan adalah pria menangkap ikan dan anggota keluarga yang perempuan menjual ikan hasil tangkap. Dalam hal ini peran perempuan pesisir adalah sebagai penambah pendapatan ekonomi rumah tangga terutama ketika masa *paceklik* yakni masa ketika ombak sedang tinggi dan ikan sulit didapat sehingga nelayan tidak memperoleh penghasilan, maka para istri nelayan biasanya bekerja untuk mendapatkan penghasilan salah satunya dengan menjual ikan asin, bekerja sebagai buruh di pabrik sekitar pesisir, dan lain sebagainya. Karakteristik masyarakat pesisir yang terakhir adalah posisi sosial nelayan yang pada umumnya memiliki status yang relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh keterasingan nelayan yang menyebabkan masyarakat non nelayan tidak mengetahui lebih jauh kondisi kehidupan nelayan yang sebenarnya, dan sedikitnya waktu serta kesempatan nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Tentu ini disebabkan banyaknya alokasi waktu nelayan untuk kegiatan penangkapan ikan daripada untuk bersosialisasi dengan masyarakat non nelayan yang memang secara geografis relatif jauh dari pantai sehingga menyebabkan masyarakat nelayan memiliki pengetahuan yang rendah terhadap dunia luar sehingga nelayan sering dipandang memiliki status yang rendah oleh masyarakat di luar pesisir.

2.2.2 Struktur Sosial Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir pada umumnya sangat menghargai budaya dan ajaran para leluhur mereka sehingga tidak jarang mereka sangat mengikuti perintah pihak yang dianggap berkuasa meskipun berbanding terbalik dengan keinginan

dan kepentingan dirinya sendiri. Senada dengan penjelasan tersenut, berikut pernyataan ahli yang menyatakan struktur sosial masyarakat pesisir yakni

“Pada umumnya masyarakat nelayan mempunyai ciri ikatan patron-klien yang kuat. Hal ini merupakan konsekuensi dari kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan risiko dan ketidak pastian hasil yang didapat setiap harinya. Bagi nelayan terutama nelayan kecil atau buruh nelayan, menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatan melautnya sebab pola patron-klien tersebut merupakan institusi jaminan sosial ekonomi satu-satunya yang ada dalam masyarakat pesisir” (Satria, 2015:39).

Berdasarkan definisi tersebut dapat digambarkan bahwa hubungan nelayan dengan patronnya yang menguasai sumber daya dan modal besar memiliki perbedaan posisi sehingga menyebabkan ikatan pola patron klien tersebut berlangsung. Hubungan tersebut sangat terlihat ketika hasil tangkapan kurang baik maka otomatis nelayan tidak mendapatkan pendapatan yang cukup sehingga membutuhkan patron untuk meminjam uang. Dalam sistem peminjaman uang tersebut tidak jarang nelayan memberikan jaminan ikatan pekerjaan dan penjualan hasil tangkapan kepada patron dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Selain itu, patron seringkali memberikan modal untuk melaut seperti kapal laut dan alat tangkap ikan. Akan tetapi, nelayan sering dihadapkan dengan beberapa masalah misalnya tidak berakhirnya pelunasan kredit kepada patron yang dibayar setiap penjualan hasil tangkapan sehingga nelayan merasa hal ini adalah sarana untuk menjebak klien agar bisnis patron terus berjalan, sedangkan patron menganggap nelayan tidak disiplin dalam pembayaran dan lebih mementingkan pengeluaran konsumtif misalnya pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain sebagainya. Beberapa permasalahan tersebut yang seringkali dijumpai dalam sistem sosial masyarakat pesisir yang tidak jarang merugikan pihak nelayan terutama nelayan kecil dan nelayan buruh dibanding pemilik modal.

Masyarakat pesisir dalam kehidupannya juga mengenal adanya stratifikasi sosial atau penggolongan sosial. Menurut Kusnadi (2002:2), penggolongan sosial dalam masyarakat pesisir atau nelayan dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yakni dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, dan ditinjau dari tingkat teknologi

peralatan tangkap yang digunakan. Jika ditinjau dari segi penguasaan alat-alat produksi, masyarakat pesisir dapat dibedakan menjadi dua yakni pemilik alat-alat produksi dan nelayan buruh. Posisi nelayan buruh dalam masyarakat pesisir merupakan kelompok terendah yang hanya mengandalkan tenaganya dalam bekerja dengan gaji yang sangat rendah. Jumlah nelayan buruh lebih besar dan memiliki keuntungan yang sangat rendah dalam kegiatan kelautan dibanding dengan nelayan pemilik alat produksi dan alat tangkap seperti jarring dan perahu.

Selanjutnya struktur sosial masyarakat pesisir ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya dapat dikategorikan menjadi dua kategori yakni nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan besar maksudnya adalah nelayan dengan jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. Klasifikasi yang terakhir adalah berdasarkan tingkat peralatan tangkap yang digunakan, dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dan jumlah nelayan modern tersebut relative kecil dibanding dengan jumlah nelayan tradisional. Perbedaan tersebut berdampak pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir yang biasanya masing-masing merupakan kategori sosial-ekonomi yang relatif sama, dengan orientasi usaha serta perilaku yang berbeda-beda.

Ketimpangan sistem bagi hasil antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh lebih besar terjadi pada unit-unit penangkapan yang lebih canggih atau modern sehingga kecenderungan ini sangat merugikan nelayan buruh. Hasil studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan nelayan pemilik, tingkat kehidupan sosial ekonomi nelayan buruh sangat rendah dan bahkan dapat dikatakan sebagai lapisan sosial yang paling miskin di masyarakat pesisir dan merupakan subjek pemberdayaan yang paling tepat karena mengalami permasalahan yang seringkali tidak dapat diselesaikan sendiri terutama mengenai pemenuhan kebutuhan hidup.

2.2.3 Permasalahan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir yang sebagian besar merupakan masyarakat nelayan sama halnya dengan masyarakat lain juga menghadapi berbagai persoalan seperti masalah politik, sosial, dan ekonomi yang sangat kompleks. Namun, seringkali

permasalahan masyarakat pesisir berkaitan dengan sumber daya laut dan perikanan serta kerusakan ekosistem, berikut beberapa permasalahan pesisir menurut ahli

“Masalah yang dihadapi oleh nelayan diantaranya sebagai berikut: kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat; keterbatasan akses modal teknologi dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha; kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada; kualitas sumber daya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik; degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil; dan belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional” (Kusnadi (2006:15-20).

Selain itu, Illo dan Polo(1990:17) dalam Kusnadi (2009) menyimpulkan hasil studi bahwa rumah tangga nelayan akan menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan jika hanya bertumpu pada aktivitas dari melaut, karena sumberdaya perikanan terus mengalami penipisan. Menurutnya, unuk bisa bertahan dan meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga, rumah tangga nelayan harus mengembangkan strategi-strategi ekonomi yang beragam di luar sektor penangkapan, seperti berdagang, bertani, dan beternak. Dalam aktivitas mata pencaharian tambahan tersebut, kaum perempuan dapat berpartisipasi secara aktif.

Kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang dihadapi oleh rumah tangga nelayan buruh berasal dari beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan kedalam faktor alamiah dan faktor non alamiah. Faktor alamiah berkaitan dengan perubahan musim penangkapan dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa. Sedangkan, faktor non alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang telah berlangsung sejak seperempat abad terakhir ini.

Pada masa musim ikan kegiatan penangkapan meningkat karena hasrat untuk memperoleh hasil tangkapan sangat kuat sehingga nelayan sering mengabaikan bahaya yang disebabkan oleh kondisi alam dan iklim, seperti ombak

besar dan hujan deras yang disertai angin kencang. Namun, pada saat memasuki bulan musim kemarau maka penghasilan akan berkurang. Penghasilan akan berkurang ketika memasuki bulan-bulan musim kemarau sebab nelayan sering tidak memperoleh hasil tangkapan dan berlangsung sekitar delapan bulanan sehingga tabungan para nelayan selama musim ikan harus digunakan saat musim kemarau dan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan sehari-hari nelayan buruh. Masa sulit mendapatkan tangkapan ini disebut dengan masa *laep* atau *paceklik*.

Dalam masa *laep* atau masa sepi penghasilan, biasanya istri dan anak-anak nelayan buruh harus ikut mencari nafkah dengan melakukan pekerjaan yang mendatangkan penghasilan. Demikian juga ketika sedang tidak melaut, nelayan buruh dapat bekerja apa saja di darat untuk memperoleh penghasilan sehingga kelangsungan hidup rumah tangganya dapat terjamin. Akan tetapi, peluang pekerjaan bisa diperoleh nelayan buruh tergantung dengan situasi dan kondisi sumber daya ekonomi setempat. Pada masyarakat di wilayah pesisir yang hanya menggantungkan pada produksi perikanan laut akan sulit mendapatkan peluang pekerjaan.

2.3 Konsep Ekosistem Pesisir

Ekosistem pesisir memiliki sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir. Salah satunya adalah sumberdaya perikanan, rumput laut, mangrove dan lain sebagainya yang digunakan oleh masyarakat pesisir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dikonsumsi langsung maupun sebagai sumber pendapatan masyarakat sehingga keberadaan ekosistem pesisir sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut tidak diimbangi dengan pemeliharaan ekosistem pesisir sehingga mengakibatkan kerusakan di beberapa wilayah pesisir di Indonesia yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan mereka mengenai pentingnya merawat dan memelihara ekosistem pesisir untuk keberlanjutan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Maka dari itu, kegiatan dan program yang bertujuan untuk merawat ekosistem pesisir perlu mendapatkan perhatian khusus pihak-pihak yang terkait agar

keberlangsungan masyarakat pesisir dan sumber daya pesisir masih dapat terjaga dengan baik.

2.3.1 Definisi Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir seringkali diartikan sebagai lahan daratan yang berbatasan langsung dan pantai yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman dan tidak jarang ditempat oleh manusia sebagai tempat tinggal maupun tempat melakukan usaha dipesisir terutama di kawasan wisata pantai. Senada dengan ini, Salm dan Clark (1984) menyatakan bahwa wilayah pesisir merupakan suatu jalur daratan dan laut yang terdapat di sepanjang pesisir. Wilayah ini termasuk salah satu wilayah yang ditempati oleh sebagian masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada hasil laut dalam memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan hidupnya. Sedangkan menurut Nybakken (1982), wilayah pesisir merupakan peralihan antara darat dengan laut yang sangat dinamis dan produktif yang habitat dan jenis biotanya beradaptasi secara khusus terhadap lingkungan yang unik. Pada wilayah pesisir berkembang berbagai ekosistem yang khas meliputi estuaria, hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang dan pantai intertidal. Ekosistem tanaman maupun biota laut yang ada di wilayah pesisir dapat dijadikan sebagai sumber daya yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat pesisir. Sebagai contohnya tanaman mangrove yang pohonnya dapat dijadikan sebagai arang dengan kualitas tinggi sehingga mampu memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat, usaha produksi perikanan yang berasal dari hasil tangkapan ikan di laut, dan tambahan pendapatan yang berasal dari biota laut yang ada di sekitar mangrove, dan lain sebagainya.

2.3.2 Karakteristik wilayah pesisir

Sama halnya dengan daerah lainnya, wilayah pesisir juga memiliki beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya. Beberapa karakteristik wilayah pesisir diantaranya adalah sebagai berikut : wilayah yang mempunyai daya dukung yang sangat tinggi dan merupakan tempat terkonsentrasinya berbagai kegiatan manusia, secara geografis wilayah pesisir

pada umumnya didiami penduduk dengan beragam latar belakang mata pencaharian sehingga rentan terhadap kerusakan lingkungan, pengeksploitasian wilayah pesisir dengan cara monokultur ditinjau dari sisi ekonomi dan ekologi berdampak terhadap kerusakan lingkungan sehingga kerusakan wilayah pesisir ini akan berpengaruh besar terhadap wilayah lain terutama wilayah di sekitar pesisir, pada era globalisasi dan informasi dewasa ini, wilayah pesisir merupakan domain penting, sebagai pintu gerbang informasi dan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa, lalu lintas barang dan transformasi masal, dari perspektif masyarakat lokal, wilayah pesisir seringkali menjadi kancah perebutan wilayah usaha dan sumber konflik antar pemangku kepentingan (Nugroho dan Dahuri (2004) dalam (Haba,2016:1-2)).

Karakteristik wilayah pesisir diatas menggambarkan kompleksitas wilayah pesisir yang merupakan wilayah tempat tinggal penduduk, wilayah dengan sumber daya kelautan yang sangat tinggi sehingga mampu menopang kehidupan masyarakat dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, berfungsi sebagai jasa lalu lintas berbagai kegiatan ekonomi baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri, dan wilayah pesisir juga merupakan wilayah yang diperebutkan oleh para pihak sehingga mengundang adanya konflik dan pertentangan antar pihak. Maka dari itu, diperlukan adanya pemeliharaan wilayah pesisir agar sumberdaya wilayah pesisir bersifat berkelanjutan, serta perlindungan dari penguasa ilegal yang memperebutkan wilayah pesisir sehingga berpotensi untuk merusak sumber daya wilayah pesisir.

2.3.3 Definisi Ekosistem Pesisir

Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi (Soemarwotto, 1991). Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara organisme dan lingkungannya, baik unsur tidak hidup maupun unsur hidup (ekologi). Adapun komponen dalam ekosistem yaitu : bahan tidak hidup (abotik), konsumen, dan pengurai atau perombak. Bahan tak hidup yang dimaksud disini adalah suatu komponen yang berbntuk fisik dan kimia diantaranya udara, air, tanah, dan sinar

matahari yang merupakan sarana berlangsungnya kehidupan produsen, tumbuhan berklorofil, dan organisme lainnya. Sedangkan konsumen adalah organisme yang terdiri dari hewan dan manusia sebagai konsumen organisme lain, sebagai contohnya manusia yang mengkonsumsi ikan hasil tangkapan laut atau mengkonsumsi buah mangrove sebagai pengganti pangan lokal. Komponen yang terakhir adalah pengurai atau perombak yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang sudah mati misalnya cacing, jamur, dan bakteri.

Beberapa komponen ekosistem tersebut bersinergi satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan makhluk hidup yang ada dalam ekosistem. Salah satu jenis ekosistem yang ada dan dibutuhkan manusia adalah ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir terdiri dari beberapa komponen penting didalamnya baik masyarakat pesisir, tumbuhan mangrove dan tumbuhan lainnya, biota laut, serta komponen abiotik seperti pasir, air laut, dan lain-lain yang saling melengkapi satu sama lain.

2.3.4 Karakteristik Ekosistem Pesisir (Tipologi ekosistem pesisir)

Ekosistem pesisir merupakan suatu kumpulan beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir. Komponen tersebut diantaranya tumbuhan, biota laut, air laut, maupun daratan. Untuk lebih jelasnya berikut pernyataan ahli mengenai ekosistem pesisir dan karakteristiknya :

“Tipologi ekosistem pesisir berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan dalam ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, pantai berbatu, formasi pescapra, formasi barringtonia, estuaria, laguna, delta, dan ekosistem pulau kecil. Ekosistem pesisir tersebut ada yang terus menerus tergenangi air dan ada pula yang hanya sesaat. Sedangkan ekosistem buatan antara lain tambak, sawah pasang-surut, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan pemukiman” (Dahuri, R, 2001).

Dapat disimpulkan bahwa ekosistem pesisir memiliki dua jenis yakni ekosistem alami dan ekosistem buatan yang sebagian besar digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia baik yang tinggal di wilayah pesisir maupun masyarakat diluar pesisir sehingga tidak jarang menyebabkan kerusakan.

Berbagai ancaman kerusakan ekosistem pesisir seringkali disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: overeksploitasi sumberdaya hayati laut akibat penangkapan ikan yang melampaui potensi, pencemaran dan degradasi fisik hutan mangrove dan terumbu karang sebagai sumber makanan biota laut tropis, pencemaran akibat kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian di darat, maupun kegiatan di laut, termasuk perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak dan kegiatan pertambangan dan energi lepas pantai; dan bencana alam seperti tsunami, banjir, erosi, dan badai (Wahyudin, 2005:43)

Permasalahan ekosistem pesisir yang dikemukakan diatas merupakan permasalahan yang umum terjadi yang banyak dijumpai di Indonesia meliputi : pencemaran, kerusakan habitat pantai, pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan, abrasi pantai, konversi kawasan lindung dan bencana alam. Permasalahan-permasalahan tersebut sebagian besar diakibatkan oleh aktifitas kegiatan manusia baik yang tinggal di dalam maupun masyarakat yang berada di luar kawasan ekosistem pesisir pada saat berkunjung ke wilayah pesisir. Salah satunya dengan merusak komponen ekosistem yang ada maupun meninggalkan sampah di pesisir.

Selain itu, dalam ekosistem pesisir sering terjadi konflik mengenai pemanfaatan ruang misalnya antara pertanian dan kegiatan daerah hulu lainnya, perikanan laut, dan pemukiman. Konflik ini disebabkan karena tidak adanya peraturan yang jelas tentang penataan ruang dan alokasi sumberdaya yang terdapat di kawasan pesisir dan lautan, serta kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya masyarakat pesisir turut memperberat tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak terkendali.

2.4 Konsep Konservasi Mangrove

Konservasi tanah dan air dapat dikategorikan sebagai perpaduan ilmu pengetahuan yang mengembangkan teknologi pengawetan sumber daya alam khususnya sumber daya tanah dan air sebagai faktor penentu kualitas lingkungan hidup (Triwanto, 2012:1). Sejalan dengan pendapat ahli tersebut, Sarief (1985:76) menyatakan bahwa konservasi tanah merupakan usaha-usaha untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas tanah, kualitas, dan kuantitas air. Maka dari itu, dapat

disimpulkan bahwa upaya konservasi tanah memiliki tujuan untuk memperbaiki dan menjaga keadaan tanah agar tahan terhadap goncangan dan gangguan baik yang berasal dari angin maupun gerakan lain yang dapat menimbulkan hancurnya permukaan tanah, serta menutup tanah dengan tanaman atau sisa-sisa tumbuhan agar terlindung dari pukulan langsung yang berasal dari jatuhnya air hujan.

Salah satu faktor yang menyebabkan konservasi tanah dan air penting dilakukan adalah terjadinya degradasi lahan. Menurut Requier dalam Triwanto (2012:5), degradasi lahan sebagai hasil dari suatu atau beberapa proses yang dapat mengurangi tingkat kemampuan lahan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang untuk memproduksi suatu barang dan atau jasa baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dilihat dari penyebab dan gejalanya, proses degradasi lahan ini dapat digolongkan ke dalam enam kategori yaitu : erosi oleh air, erosi oleh angin, berkelebihan garam, degradasi kimia, degradasi fisik, dan degradasi biologis. Erosi adalah proses hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian tanah dan satu tempat ke tempat lain (Triwanto, 2012:41). Sementara itu, Hudson (1979) kemudian menyempurnakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi menjadi dua golongan, yakni : Erosivitas (kemampuan hujan untuk menimbulkan erosi) dan Erodibilitas (kemampuan tanah untuk menahan tidak terjadinya erosi). Pengaruh erosi terhadap fisik tanah dapat dicirikan dengan terjadinya : penghanyutan partikel tanah, perubahan struktur tanah, penurunan kapasitas infiltrasi dan penampungan, dan perubahan profil tanah.

Tumbuhan mangrove merupakan salah satu tumbuhan yang berguna untuk melindungi lahan pesisir dari erosi dan abrasi pantai yang mengakibatkan pengikisan lahan daratan. Hal ini dikarenakan tumbuhan mangrove memiliki daya adaptasi fisiologi dan morfologi yang unik untuk terus hidup pada lingkungan yang bersalinitas tinggi dan kondisi anaerob di perairan laut dangkal. Daya adaptasi tersebut menurut Nybakken dkk. (1986: 89) adalah sebagai berikut:

- (1) Perakaran yang pendek dan melebar luas dengan akar penyangga atau tudung akar yang tumbuh dari batang dan dahan, sehingga menjamin kokohnya batang;
- (2) Berdaun kuat dan mengandung banyak air;

- (3) Mempunyai banyak jaringan internal penyimpan air dan konsentrasi garam yang tinggi.

Selain itu, hutan mangrove merupakan ekosistem yang dinamis dan memiliki kemampuan pulih dengan cepat jika kondisi geomorfologi dan hidrologi serta komposisi habitat tidak diubah oleh penggunaannya (Martinuzzi dkk, 2009: 78). Selain pertumbuhan yang cepat, mangrove memiliki kelebihan lain yaitu mampu menciptakan habitat bagi banyak komunitas organisme lain, dan fotosintesis mangrove menyediakan energi dasar bagi sebuah ekosistem yang luar biasa (Hogart, 2007: 65). Oleh karena itu, mangrove sangat berpotensi untuk melindungi ekosistem pantai dari berbagai kerusakan termasuk melindungi pantai dari terjangan air ombak yang dapat mengakibatkan degradasi lahan.

Tumbuhan mangrove juga memiliki beberapa fungsi bagi kehidupan manusia baik bagi fungsi sosial, ekonomi, dan biologis untuk melindungi wilayah pesisir dari kerusakan yang diakibatkan oleh gelombang ombak air laut. Fungsi sosial ekonomi hutan mangrove yakni sebagai sumber pendapatan tambahan masyarakat pesisir diantaranya mangrove dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan kerajinan, wisata alam, areal pertambakan, kulit batang pohon digunakan untuk bahan pengawet dan obat-obatan, dan seterusnya (Ujung Kulon Conservation Society, 2010). Dari segi biologis, mangrove merupakan tempat ideal untuk berpijah berbagai jenis larva ikan dan udang yang bernilai ekonomi penting (Wibisono, 2005: 93). Keberadaan hutan mangrove juga penting bagi pertanian di sepanjang pantai terutama sebagai pelindung dari hempasan angin, air pasang, dan badai. Selain itu, budidaya lebah madu juga dapat dikembangkan di hutan mangrove. Bunga dari *Sonneratia sp.* dapat menghasilkan madu dengan kualitas baik.

Areal hutan mangrove yang masih terkena pasang surut dapat dijadikan pembuatan garam yang dapat dilakukan dengan perebusan air laut dengan kayu bakar dari kayu-kayu mangrove yang mati (Anwar dan Gunawan, 2007:89). Sedangkan Kusmana (1995:66) menyatakan bahwa fungsi hutan mangrove dibagi atas tiga yaitu: (1) fungsi fisik untuk melindungi lingkungan dari pengaruh oseanografi (pasang surut, arus, angin topan, dan gelombang), mengendalikan

abrasi dan mencegah intrusi air laut ke darat; (2) fungsi biologi, sangat berkaitan dengan perikanan yaitu sebagai daerah asuhan, daerah mencari makan, dan daerah pemijahan dari beberapa jenis ikan dan udang, serta merupakan penyuplai unsur-unsur hara utama di pantai khususnya daerah lamun dan terumbu karang; (3) fungsi ekonomi, sebagai sumber kayu kelas satu, bahan kertas, dan arang.

Kegiatan manusia secara signifikan mengurangi luas area ekosistem mangrove, mengubah proporsi asli spesies mangrove, dan bahkan merusak ekosistem mangrove. Setyawan dan Winarno (2006: 54-56) juga menyatakan bahwa penebangan hutan mangrove selain berdampak pada punahnya vegetasi mangrove berakibat pada hilangnya habitat yang penting untuk tumbuhan dan hewan pada skala global hilangnya lahan basah berpengaruh bagi banyak jenis burung migran, burung air dan ikan. Kegiatan masyarakat pesisir di sekitar kawasan hutan mangrove mengakibatkan perubahan karakteristik fisik dan kimiawi, sehingga tempat tersebut tidak lagi sesuai bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna di hutan mangrove. Tekanan tersebut termasuk kegiatan reklamasi, misalnya bangunan rumah, industri, tambak udang/ikan dan tambak garam, pemanfaatan kayu mangrove untuk berbagai keperluan, berupa kayu bakar dan sebagai bahan bangunan, pemanfaatan daun mangrove sebagai makanan ternak yang berlebihan, penambangan pasir, tempat tambat labuh perahu/kapal dan pembuangan sampah (Khomsin, 2005: 77).

Kerusakan dapat menurunkan fungsi-fungsi mangrove baik secara bio-ekologis berupa rusaknya sistem maupun fungsi ekonomis berupa penurunan produksi (Sunarto, 2008: 58). Sementara Granek dan Ruttenberg (2008: 77-81) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perubahan pada sistem ekosistem mangrove dapat mengubah properti melalui efek langsung pada faktor-faktor abiotik seperti suhu, cahaya dan nutrisi pasokan atau melalui perubahan-perubahan dalam faktor-faktor biotik seperti produktivitas primer atau komposisi jenis.

Maka dari itu, diperlukan adanya kegiatan pengembalian hutan mangrove atau rehabilitasi mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir dari kerusakan dan melindungi biota laut yang berada dalam ekosistem hutan mangrove. Menurut

Bosire (2008: 67), kegiatan rehabilitasi dan restorasi mangrove dapat mendorong kembalinya spesies-spesies tersebut dan dalam beberapa kasus pada tingkat yang sama, mangrove hasil restorasi mampu menyetarakan dengan tegakan alami. Sementara Han dkk. (2003 :45) mengusung konsep pengelolaan daerah mangrove sebagai preferensi konservasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan serta pengelolaan zona pantai terpadu. Oleh karena itu, peraturan pengelolaan konservasi sumberdaya mangrove yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan tegas dan didukung oleh penegakan hukum yang berlaku. Sedangkan Bengen (2001) dalam Haikal (2008: 64), menyebutkan bahwa pelestarian hutan mangrove merupakan suatu unit usaha yang kompleks untuk dilaksanakan karena kegiatan tersebut sangat membutuhkan sifat akomodatif terhadap pihak-pihak terkait baik yang berbeda di sekitar maupun di luar kawasan.

Terdapat dua jenis dampak konversi dan pemanfaatan hutan mangrove, yaitu: (1) dampak terhadap lingkungan fisik dan biologis; dan (2) dampak terhadap lingkungan sosial ekonomi. Dampak fisik dan biologis yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan aspek amunitas dan ketersediaan sumber penghasilan dari keberadaan hutan mangrove di kawasan sekitar tempat tinggal penduduk. Dampak ini pula berupa penurunan keragaman, stabilitas, dan produktifitas biologis (Jakaria,2000: 39).

Dengan demikian konservasi mangrove merupakan aspek penting dalam mengelola sistem pantai tropis (Granek dan Ruttenberg, 2008: 77). Berikut ini beberapa peraturan yang ada sebagai landasan untuk melaksanakan konservasi mangrove : adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 / 2008 tentang kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau kecil adalah satu peraturan tidak langsung dalam tataran pemanfaatan pengelolaan mangrove;

- a. Keputusan Presiden Nomor 32 / 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Dikatakan dalam peraturan ini bahwa ekosistem mangrove merupakan kawasan lindung. Turut diatur didalamnya adalah kriteria sempadan pantai (Pasal 14) dan kawasan pantai berhutan bakau (Pasal 27);

- b. Perpres 121 / 2012 tentang rehabilitasi pesisir. Peraturan hasil inisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mengatur kriteria kerusakan ekosistem, tahapan rehabilitasi, monitoring, peran serta dan pembiayaan kegiatan rehabilitasi;
- c. Perpres 73 / 2012 tentang Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SPEM). Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disingkat SPEM adalah upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mencapai tujuan terwujudnya pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Adapun langkah-langkah pengelolaan mangrove yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut (Martinuzzi, 2009:98) : mengidentifikasi daerah-daerah yang memenuhi persyaratan ekologis pembangunan mangrove, memasukkan peraturan zonasi lebih baik untuk pemeliharaan daerah ini secara alami dan untuk melindungi fluks air, nutrisi, serta organisme yang masuk dan keluar dari sistem, serta memonitor hasil.

Menurut FAO (2009) langkah-langkah konservasi mangrove yakni : mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk pengembangan ekowisata; mengidentifikasi kegiatan ekowisata yang tepat yang tidak merugikan lingkungan; mengelola pengunjung, mengontrol jumlah pengunjung perperjalanan, pengendalian dampak dengan mengambil semua kebutuhan yang diperlukan serta membawa semua sampah ke daerah-daerah terpencil; dan merancang fasilitas yang menyatu dengan alam sekitarnya. Sedangkan menurut Purnobasuki (2005:82) langkah-langkah konservasi mangrove adalah sebagai berikut : mengalokasikan manfaat ekologis dan ekonomis secara rasional dan diselaraskan dengan kepentingan nasional yang berkesinambungan, mengadakan pemetaan secara akurat potensi mangrove yang ada di wilayah Indonesia, dan menginventarisasi berbagai macam penggunaan mangrove yang sudah berjalan dan proyeksi penggunaan yang telah ditetapkan di dalam perencanaan, yang dituangkan dalam bentuk masa pelaksanaan.

2.5 Konsep Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pesisir

Undang-undang negara Republik Indonesia telah mengatur mengenai definisi, penyelenggara, dan lembaga kesejahteraan sosial. Dalam pasal 1 ayat (2) No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial dalam hal ini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya; Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan seterusnya. Sementara itu, dalam pasal 1 ayat (6) undang-undang No.11 tahun 2009 disebutkan bahwa pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta pasal 1 ayat (7) undang-undang No.11 tahun 2009 yang dinyatakan bahwa lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pasal 38 ayat (1) dan (2) undang-undang No.11 tahun 2009 dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh : perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial asing dan seterusnya.

Senada dengan pendapat diatas, Midgley dalam Adi (2005:16) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan manusia baik kebutuhan dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, kebutuhan makanan dan lain-lain sehingga dengan pemenuhan kebutuhan tersebut seorang individu, kelompok, maupun komunitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Secara konsepsi, kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga hal pokok (Suharto, 2014:2) yaitu : kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial; Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial; dan Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok, maupun komunitas dikenal dengan istilah Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS). Menurut Suharto (1997:88), pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta merupakan institusi-institusi sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup (Suharto, 2014:4) :

- 1) Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan dan sangat memerlukan perlindungan sosial;
- 2) Peningkatan pemberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan;

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan seperangkat kegiatan yang diupayakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah maupun di suatu negara dengan mengoptimalkan pelayanan sosial dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok yang lemah seperti masyarakat miskin,

penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis, serta anak terlantar, dan lain sebagainya. Selain itu juga melalui kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan maupun pendidikan pengetahuan tertentu, dan pemberian kebebasan untuk seluruh masyarakat yang meliputi kebebasan berpendapat, dan kebebasan memilih keputusan-keputusan yang dianggap baik untuk dirinya.

2.5.1 Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pesisir

Kesejahteraan sosial masyarakat pesisir yang dimaksud dalam hal ini adalah kesejahteraan masyarakat nelayan yang mayoritas berada dan tinggal di wilayah pesisir. Masyarakat nelayan sejahtera adalah nelayan yang berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupannya. Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan sosial memiliki kontribusi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nelayan atau masyarakat pesisir. Dengan kemampuannya mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia, hal ini akan menjamin aktivitas pembangunan yang berkelanjutan di kawasan pesisir. Dalam konteks demikian, pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan semua pihak (Kusnadi, 2007 :29).

Secara umum, tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir dan lautan di Indonesia antara lain adalah : (a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (b) Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan; (c) Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan (d) peningkatan pendidikan, latihan, riset, dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan (Dahuri, 2001: 67).

Sedangkan menurut Kusnadi (2006a:94-95), pengorganisasian masyarakat nelayan adalah suatu upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk menggali sumber daya dan membangun kekuatan kolektif seluruh elemen masyarakat serta mengelola potensi kolektif sumber daya tersebut untuk meningkatkan kapasitas masyarakat mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan yang ada dalam rangka

mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan sosial, kemakmuran ekonomi, dan peningkatan kualitas kehidupan yang berbudaya secara berkelanjutan. Seluruh proses pencapaian ini dilakukan dengan cara-cara yang beradab, demokratis, transparan, partisipatif, proporsional, dan menjunjung tinggi toleransi sosial.

2.6 Konsep Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir

Ekosistem pesisir merupakan gabungan dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan yang saling mengimbangi. Komponen ekosistem terdiri dari air, tumbuhan, biota laut, pasir, mangrove dan lain sebagainya yang saling bergantung satu sama lain. Dalam artian bahwa jika satu komponen bermasalah maka akan mengganggu fungsi komponen lainnya, seperti contohnya kerusakan mangrove yang berdampak pada terjadinya abrasi pantai yang mengakibatkan degradasi lahan atau pengikisan lahan. Masing-masing komponen tersebut tidak hanya bermanfaat terhadap komponen lainnya dalam ekosistem pesisir, namun juga bermanfaat terhadap kehidupan manusia terutama sumberdaya perikanan yang seringkali dijadikan sumber pendapatan ekonomi masyarakat pesisir setempat, pesisir pantai yang indah dapat menarik para wisatawan sehingga menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat setempat, dan fungsi lainnya yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia terutama masyarakat pesisir.

2.6.1 Definisi Fungsi dan Jasa

Fungsi seringkali diartikan sebagai sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan jasa didefinisikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, kerja suatu bagian tubuh, dan lain-lain. Menurut Kotler (2000:428), jasa ialah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun, serta produksinya bisa atau tidak terikat pada suatu produk sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu subjek untuk membantu proses berlangsungnya kegiatan. Sedangkan, jasa merupakan aktivitas yang ditawarkan oleh individu kepada individu lainnya, individu kepada kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang tidak berupa barang

maupun benda-benda lainnya namun hanya berupa tenaga yang ditawarkan untuk membantu memudahkan kegiatan atau urusan pihak lain tersebut.

2.6.2 Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir

Sama seperti komponen lainnya, ekosistem pesisir memiliki fungsi dan jasa baik untuk manusia maupun untuk keseimbangan lingkungan sekitarnya. Beberapa fungsi dan jasa ekosistem pesisir menurut Puspitaningsih (2012:57) adalah sebagai berikut :

- a) Daerah tempat mencari makan dan daerah pemijahan berbagai jenis ikan, udang, dan biota lainnya. Ekosistem pesisir memiliki beberapa unsur didalamnya salah satunya yakni tumbuhan mangrove yang berfungsi sebagai tempat ikan dan udang serta biota laut lainnya untuk mencari makan dan bertempat tinggal;
- b) Hutan mangrove dalam ekosistem pesisir berfungsi sebagai penahan gelombang air yang deras saat terjadi tsunami yang membahayakan kehidupan manusia, peredam gelombang dan angin, pelindung dari abrasi, penahan intrusi air laut ke darat, penahan lumpur, dan perangkap sedimen;
- c) Rumput laut, yakni untuk dikonsumsi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh manusia. Pemanfaatan rumput laut secara tidak langsung untuk kehidupan manusia diantaranya yakni sebagai bahan olahan agar-agar, bahan kosmetik, pembuat kapsul, salep, dan lain sebagainya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.
- d) Pariwisata dan rekreasi. Ekosistem pesisir dengan kondisi laut yang indah dengan dihiasi biota laut dan tumbuhan mangrove maupun tumbuhan lain yang ada dapat menarik para wisatawan untuk mengunjunginya sehingga dapat dijadikan sebagai wahana pariwisata dan rekreasi.

Selain itu, ekosistem pesisir juga berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam yang terdiri dari sumber daya alam produktif baik yang dapat dikonsumsi langsung seperti pemanfaatan kayu mangrove, udang, kepiting dan biota laut lainnya, dan sumber daya alam pesisir yang tidak dapat langsung lewat perannya yang sangat besar mendukung fungsi ekologis bagi kehidupan biota laut

diantaranya mangrove, terumbu karang, padang lamun, esturaria, dan perairan pantai yang secara sinergis mempengaruhi keberadaan sumber daya hayati. Selain itu, ekosistem pesisir juga berfungsi sebagai penerima limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia namun bergantung pada besar dan jenis limbah yang masuk jika limbah melampaui batas maka akan terjadi pencemaran ekosistem pesisir, penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan seperti air bersih dan wilayah kehidupan manusia, dan penyedia jasa kenyamanan sebagai lokasi rekreasi atau pariwisata yang indah dan sejuk (Puspitaningsih, 2012:58-59). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekosistem pesisir sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia sehingga pemeliharaan ekosistem pesisir baik rehabilitasi mangrove, vegetasi pantai, dan lain sebagainya sangat penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2.7 Kajian terhadap Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar dan acuan kerangka berpikir terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dalam mengkaji permasalahan yang sedang diteliti. Maka dari itu, dengan adanya penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran perspektif-perspektif secara objektif kepada peneliti sehingga dapat menemukan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian pertama oleh Purwowibowo dan Nur Dyah Gianawati (2016) dengan judul **Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Melalui *Community Development***. Penelitian ini berisi kegiatan komunitas setempat dalam upaya memperbaiki kondisi ekosistem mangrove yang berbasis pengembangan komunitas (*Community Development*) di desa Pasar Banggi kecamatan Rembang kabupaten Jawa Tengah. Kegiatan pelestarian mangrove oleh komunitas setempat dilatar belakangi oleh kondisi kerusakan tambak di sekitar pantai sehingga melakukan upaya perbaikan dengan menanam mangrove

di sekitar tanggul tambak yang di inisiasi oleh seorang penduduk setempat sehingga menjadi pemimpin informal dalam komunitas wilayah tersebut dan berlangsung selama lima puluh tahunan sejak tahun 1964. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi dan pelestarian mangrove murni inisiatif dari komunitas setempat yang dilaksanakan dan dievaluasi sendiri sehingga dapat dikatakan kegiatan ini adalah *community development* yang berbasis kearifan lokal. Hasil dari kegiatan pelestarian mangrove oleh komunitas setempat selain tumbuhnya mangrove sepanjang kawasan tambak sekitar pantai adalah semakin bertambahnya anggota komunitas yang berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan mangrove yang pada tahun 2012 sudah berjumlah 57 orang. Selain itu, adanya dukungan pemerintah setempat melalui pengadaan bibit mangrove dan biaya operasional penanaman, dukungan dari berbagai instansi berupa bantuan *polybag* sebagai media pembibitan sehingga hasil pembibitan lebih baik dan berkualitas. Kegiatan masyarakat setempat yang aktif dalam kegiatan pembibitan mangrove di desa Pasar Banggi berdampak terhadap peningkatan ekonomi komunitas setempat yakni dengan menjual bibit mangrove ke berbagai daerah lain dan banyak instansi pemerintah ataupun lembaga perguruan tinggi juga berpartisipasi mendukung kegiatan rehabilitasi mangrove oleh komunitas setempat. Namun, untuk saat ini kegiatan penanaman sudah mulai berkurang. Hal ini karena wilayah pesisir Desa Pasar Banggi telah tertanami semua dengan pohon mangrove sehingga kegiatan anggota komunitas berfokus pada pemeliharaan dan penyulaman tanaman mangrove yang mati. Perbedaan penelitian yang berjudul Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Melalui *Community Development* dengan penelitian ini adalah fokus penelitian. Jika penelitian Purwowibowo dan Nur Dyah Gianawati (2016) berfokus pada peran komunitas lokal dalam pelestarian hutan mangrove berbasis pengembangan komunitas, maka penelitian ini berfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui mangrove oleh lembaga swadaya masyarakat Simphoni Akar Rumput (SAR) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mochamad Roziqin (2008) dengan judul **Pemeliharaan Ekosistem Laut melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Kearifan Lokal (Studi Deskriptif di desa Banjarwati kecamatan Paciran kabupaten Lamongan**. Penelitian ini berisi pemanfaatan kearifan lokal di Desa Banjarwati kecamatan Paciran kabupaten Lamongan sebagai cara untuk menjaga ekosistem pesisir masyarakat. Kearifan lokal di daerah tersebut yakni terdiri dari kepercayaan masyarakat yang sangat kuat terhadap kawasan air laut dengan mempercayai bahwa di beberapa tempat di sekitar pesisir sebagai tempat keramat, pantangan untuk tidak menggunakan alat tangkap ikan selain jaring bondet di kawasan Anjer dan Karang Pendok yang dianggap tempat keramat, dan tidak boleh menangkap ikan jenis cucut yang dipercaya sebagai ikan yang dapat membantu aktivitas manusia ketika di laut. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan kesadaran kolektif dalam masyarakat bahwa jika mereka menggunakan alat tangkap yang tidak diperbolehkan maka akan mengganggu sumber ekonomi dan ekosistem pesisir sekitar sehingga dapat mengancam masa depan mereka. Oleh karena itu, jika ada pemberdayaan yang akan di implementasikan di desa Banjarwati maka dapat disesuaikan melalui pengoptimalan potensi dan pengoptimalan kearifan lokal yang ada, serta pengembangan sistem peralatan tradisional yang juga disesuaikan dengan nilai lokal & lingkungan fisik alamiah desa Banjarwati. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Roziqin memfokuskan pada pemeliharaan ekosistem laut melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal setempat, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui mangrove.

Penelitian ketiga oleh Sutrisno (2015) dengan judul **Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati**. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Pati dalam pengembangan tanaman mangrove berdasarkan indikator perencanaan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan menghasilkan skor rata-rata 41,81 dan termasuk dalam kategori cukup. Jumlah skor tersebut menjelaskan bahwa masyarakat pesisir sudah mulai memiliki rasa kepedulian terhadap

pengembangan tanaman mangrove dan menyadari bahwa tanaman mangrove dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka sehingga perlu adanya pelestarian ekosistem mangrove dan menjaga kelestarian pantai. Namun, masih ada sebanyak 0,71% responden yang masih memiliki partisipasi rendah terhadap rehabilitasi mangrove sehingga diperlukan adanya pemahaman dan motivasi kepada mereka agar dapat berpartisipasi terhadap rehabilitasi ekosistem mangrove. Selain itu, dalam penelitian ini menjelaskan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di kabupaten Pati dapat dikategorikan sebagai berikut: penyuluhan termasuk dalam kategori tinggi (skor 17,34), sosialisasi tergolong cukup (skor 11,82), pembinaan termasuk dalam kategori tinggi (skor 14,67), dan pelaksanaan studi banding ke daerah lain yang telah berhasil mengembangkan rehabilitasi mangrove termasuk dalam kategori cukup (skor 6,12), dan skor rata-rata pemerintah dalam pemberdayaan ini adalah 49,94 yang termasuk dalam kategori cukup sehingga masih perlu ditingkatkan lagi partisipasinya mengingat pentingnya ekosistem mangrove bagi keseimbangan ekosistem pesisir. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian “Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove di kabupaten Pati” merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat, peran pemerintah, dan tingkat pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan ekosistem mangrove di pesisir pantai kabupaten Pati, sedangkan dalam penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui mangrove di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo dan manfaatnya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam hal ini ekosistem pesisir yang dimaksud adalah ekosistem mangrove di lokasi penelitian.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Eka Fitriah (2015) dengan judul **Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pemanfaatan Tumbuhan Mangrove Sebagai Pangan Alternatif Untuk Menghadapi Ketahanan Pangan**. Dalam penelitian yang dilaksanakan di Desa Ambulu kecamatan Losari kabupaten Cirebon ini disimpulkan bahwa masyarakat menganggap hutan mangrove memiliki banyak manfaat bagi keberlangsungan

hidup masyarakat, diantaranya mereka menyadari bahwa tumbuhan mangrove dapat mencegah terjadinya abrasi pantai, tempat berkembang biak ikan, kepiting, dan udang, serta mangrove jenis *avicennia* yang dapat dikonsumsi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah masyarakat sebanyak 5% sudah memanfaatkan mangrove sebagai bahan pangan alternatif karena jumlah energi dan karbohidrat yang lebih tinggi dibanding dengan jagung, beras, dan sagu, serta partisipasi masyarakat pesisir di desa Ambulu sudah cukup tinggi terhadap pengembangan tanaman hutan mangrove. Selain itu, diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari kegiatan penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan keterampilan masyarakat mengenai pemanfaatan tanaman mangrove sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah tujuan penelitian Eka Fitriah untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pemanfaatan tumbuhan mangrove sebagai pangan alternatif, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui mangrove di desa Duwet yang berpotensi menjaga ekosistem pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian lainnya oleh Otniel Pontoh (2011) yang berjudul **Peranan Nelayan Terhadap Rehabilitasi Ekosistem Hutan Bakau (Mangrove)**. Pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lokasi penelitian yakni desa Tiwoho kecamatan Wori kabupaten Minahasa Utara tidak terlepas dari peran masyarakat pesisir yang sebagian besar adalah nelayan. Mereka sangat aktif dalam rehabilitasi mangrove dikarenakan adanya kesadaran kolektif diantara mereka yang menyadari bahwa tanaman mangrove sangat bermanfaat bagi keberlangsungan ekosistem pesisir. Selain itu, Yayasan Kelola dan Lembaga Pendidikan yang ada di desa Tiwoho merupakan lembaga yang berperan aktif dalam upaya rehabilitasi mangrove. Namun, peran pemerintah setempat dalam hal ini kurang optimal sehingga penulis memberikan saran kepada pemerintah dan instansi terkait untuk lebih berperan serta dalam rehabilitasi mangrove di desa Tiwoho kecamatan Wori kabupaten Minahasa utara. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Jika penelitian Pontoh memfokuskan pada peranan nelayan dalam rehabilitasi mangrove, maka penelitian ini berfokus pada pemberdayaan

masyarakat pesisir melalui mangrove sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

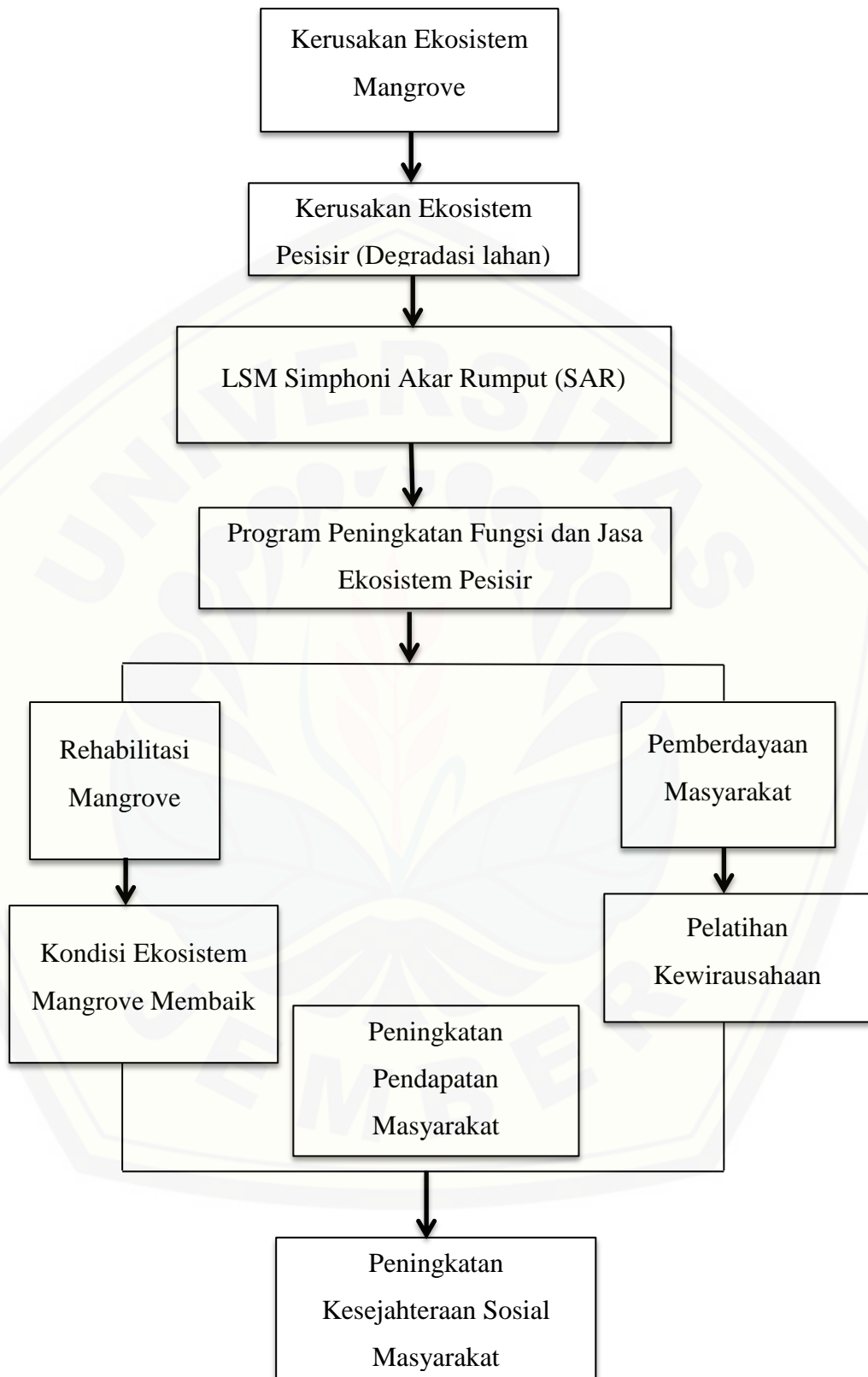
Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu semua penelitian yang dilakukan pastinya menemukan permasalahan-permasalahan baru yang muncul, fungsi penelitian terdahulu adalah untuk memastikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan acuan yang sama yaitu mengenai rehabilitasi mangrove untuk perbaikan ekosistem pesisir dan kegiatan pemberdayaan yang memanfaatkan sumberdaya pesisir setempat terutama mangrove untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungan sekitar pesisir. Beberapa penelitian terdahulu diatas memberikan tambahan wawasan kepada peneliti terutama mengenai ekosistem pesisir dan mangrove untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran logika penulis terhadap fenomena yang akan diteliti. Adanya kerangka berpikir dalam hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti mengarahkan fenomena yang akan dikaji. Adapun kerangka berfikir mengenai ide peneliti mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir adalah sebagai berikut :

Kondisi ekosistem pesisir terutama ekosistem hutan mangrove di kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal ini mengakibatkan berkurangnya luas daratan di daerah pesisir yang diakibatkan oleh gelombang ombak air laut yang seharusnya ditahan oleh tanaman mangrove di pinggir pantai. Akan tetapi sebagian mangrove yang ada dalam kondisi rusak tidak dapat menahan gelombang air laut sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi lahan tersebut. Oleh sebab itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Simphoni Akar Rumput (SAR) bekerjasama dengan Lembaga *Mangroves For The Future* (MFF) membentuk suatu program yakni program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir dengan kegiatan utama yaitu rehabilitasi mangrove yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekosistem pesisir dengan melakukan

penanaman kembali tumbuhan mangrove di wilayah pesisir kecamatan Panarukan dan peningkatan keberdayaan masyarakat setempat. Lokasi yang dipilih sebagai lokasi penanaman mangrove yakni desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo karena tingkat kerusakan mangrove parah dibanding dengan wilayah lainnya. Selain melakukan penghijauan mangrove, kegiatan di desa Duwet juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kepada dua kelompok perempuan desa Duwet berupa pelatihan produksi kerupuk kerang dan abon ikan tongkol yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan mangrove dengan mempromosikan produk lokal berbahan baku hasil tangkapan laut dan biota yang ada disekitar tumbuhan mangrove yang dapat dibuat sebagai kerupuk dan abon. Selain itu juga, mangrove dapat dimanfaatkan sebagai minuman, tepung, kue, tempe, dan banyak produk olahan mangrove lainnya. Kegiatan pemberdayaan ini juga memberikan bantuan modal bahan baku dan alat-alat produksi, pengoptimalan fungsi lembaga, serta uji coba kopi rasa mangrove yang tentunya berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.



Gambar 2.1 Alur Pikir Konsep Penelitian

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Peran metodologi dalam penelitian adalah untuk menemukan kebenaran. Menurut Moleong (2016:49), penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk membenarkan kebenaran. Manusia membutuhkan proses belajar sehingga melalui penelitian yang dilaksanakan baik penelitian ilmiah maupun penelitian alamiah yang dilaksanakan sama-sama memiliki tujuan untuk belajar, menemukan kebenaran yang berfungsi untuk melangsungkan kehidupan manusia, dan mempertahankan eksistensi manusia di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Metodologi dapat diartikan sebagai langkah nyata atau prosedur penelitian yang memudahkan proses pelaksanaan penelitian sehingga sasaran dan fokus kajian akan lebih efektif dan efisien dicapai.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016:59), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang ditandai dengan penyajian data secara numerik, penelitian kualitatif menyajikan data secara deskriptif dan tertulis yang dihasilkan dari metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sejalan dengan definisi ahli diatas, Kirk dan Miller dalam Moleong (2016:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Dalam artian bahwa penelitian kualitatif sangat mengutamakan hasil dari pengamatan secara langsung oleh

peneliti terhadap objek penelitian dan keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas atau kegiatan objek yang sedang diteliti. Oleh karena itu, suatu penelitian kualitatif akan mendapatkan hasil yang objektif jika peneliti langsung melakukan observasi langsung di lapangan (lokasi penelitian).

Berdasarkan penjelasan diatas, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menggambarkan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan memanfaatkan serta meningkatkan fungsi dan jasa ekosistem yang ada. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan uraian melalui fakta-fakta dilapangan baik secara ucapan, tulisan dan perilaku yang tampak baik oleh suatu individu, kelompok, maupun masyarakat di lokasi penelitian yakni desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Studi Kasus. Menurut Creswell (2010: 20), studi kasus merupakan strategi penelitian yang dilakukan peneliti dengan menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Sedangkan Ary dalam Idrus (2009: 57) menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu penyelidikan intensif tentang seorang individu, namun studi kasus terkadang dapat juga dipergunakan untuk menyelidiki unit sosial yang kecil seperti keluarga, sekolah, kelompok-kelompok “geng” anak muda. Studi kasus secara garis besar bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut terjadi (Yin, 2011: 2). Penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang ‘apa’ (what) obyek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang ‘bagaimana’ (how) dan ‘mengapa’ (why).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dikarenakan sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk menggambarkan, menyajikan, dan menganalisis gambaran situasi maupun kondisi sosial di lokasi penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat melalui mangrove di lokasi penelitian desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo.

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian agar nantinya proses penelitian yang dilakukan dapat berlangsung optimal dan mendapatkan hasil data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penentuan lokasi purposive, sehingga lokasi penelitian yang dipilih adalah desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo. Pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan desa Duwet merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerusakan mangrove cukup parah diantara daerah pesisir pantura Situbondo lainnya yang ditandai dengan terkikisnya kawasan daratan disebabkan abrasi pantai sebagai akibat rusaknya hutan mangrove di daerah tersebut. Pada tahun 2016, Lembaga Swadaya Masyarakat Simphoni Akar Rumput (SAR) bekerja sama dengan lembaga *Mangroves For The Future* (MFF) mengadakan program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir dengan dua bentuk kegiatan yakni rehabilitasi mangrove dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Adanya kegiatan-kegiatan rehabilitasi mangrove di desa Duwet saat ini mengakibatkan mulai adanya perubahan luas dan mengurangi kondisi kerusakan daratan pesisir sehingga mengurangi adanya potensi terjadinya abrasi dari air laut yang mengikis pantai dengan terjaganya ekosistem tanaman mangrove di daerah pesisir tersebut (Bhirawa, 2016). Program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan produksi kerupuk kerang dan abon ikan tongkol yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berdasarkan pemaparan mengenai implementasi program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir dalam upaya memperbaiki kondisi ekosistem dan kondisi masyarakat di desa Duwet, maka peneliti tertarik untuk memilih lokasi penelitian di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam sebuah penelitian kualitatif diartikan sebagai individu yang dimanfaatkan oleh peneliti dalam menggali data dan informasi penelitian yang dibutuhkan. Penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang menurut peneliti memiliki pengetahuan tentang objek penelitian dan dapat memberikan informasi yang valid dan objektif. Moleong (2016:131) menyatakan bahwa informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar suatu penelitian. Sugiyono (2012:50) menambahkan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Dari ketiga ahli tersebut dapat ditarik beberapa persamaan yakni sebagai berikut : informan merupakan seseorang yang dipilih secara langsung oleh peneliti yang memiliki pengetahuan mengenai objek yang sedang diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang objek penelitian sehingga dapat memudahkan berlangsungnya proses penelitian sehingga kesimpulan yang didapat benar-benar objektif.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Irawan (2006:17) *Purposive Sampling* adalah *sample* yang sengaja dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki ciri-ciri atau dianggap dapat memberikan informasi tertentu yang dapat memperkaya hasil penelitian. Dalam penelitian yang berjudul pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir (studi deskriptif di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo), peneliti menggunakan dua jenis informan yakni informan pokok dan informan tambahan dalam mengumpulkan data penelitian.

Sugiyono (2016: 147) menyatakan bahwa dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi beberapa kriteria diantaranya: mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati, mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti, mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi, mereka yang tidak cenderung objektif dalam menyampaikan informasi. Selain itu, informan yang awalnya bersikap asing

dengan peneliti sehingga lebih berpotensi sebagai informan atau narasumber. Sementara itu, informan pokok atau informan kunci juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan. Dalam artian bahwa seseorang yang akan dipilih sebagai informan pokok harus memiliki pengalaman mengurus atau mengelola program penelitian minimal satu tahun;
- b. Subjek yang masih terlibat secara penuh dan aktif dalam kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. Keterlibatan secara aktif di lokasi penelitian menentukan kualitas informan dan kualitas data yang diberikan terhadap peneliti. Maka dari itu, peneliti harus benar-benar memastikan bahwa informan yang akan dipilih aktif dalam kegiatan yang sedang diteliti;
- c. Subjek yang mempunyai banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi. Informan pokok harus memiliki waktu yang cukup untuk memberikan keterangan dan informasi penelitian kepada peneliti sehingga diharapkan penelitian selesai dalam waktu yang efektif dan menghasilkan data yang benar-benar asli di lapangan penelitian;
- d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu. Peneliti harus memastikan bahwa informan pokok dapat memberikan keterangan dan informasi yang objektif dan sesuai dengan realita atau fakta yang ada.

Dari beberapa kriteria diatas maka informan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ibu Eko (EK)

Informan Ibu Eko merupakan penduduk desa setempat yang bertempat tinggal di sekitar pesisir pantai Pathek. Beliau dipilih sebagai kordinator masyarakat setempat untuk memilih beberapa ibu rumah tangga untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan, sehingga memiliki pemahaman mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui mangrove di desa

Duwet. Tingkat pendidikan terakhir dari informan EK ialah Sekolah Dasar (SD).

2. Bapak Sueb (SE)

Informan Sueb merupakan penduduk desa setempat yang melakukan rehabilitasi mangrove secara mandiri di sekitar pantai Pathek sejak tahun 1980. Tempat tinggal informan Sueb juga berada di sekitar lokasi rehabilitasi mangrove dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan melalui mangrove yang diprakarsai oleh lembaga Simphoni Akar Rumput (SAR) sehingga memiliki pemahaman mengenai kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Duwet. Tingkat pendidikan terakhir informan Sueb adalah Sekolah Dasar (SD).

3. Informan Nur Aisyah (NA)

Informan Nur Aisyah merupakan penduduk desa Duwet yang saat ini menduduki jabatan sebagai kepala desa. Kepala desa yang memahami kondisi masyarakat setempat, kondisi wilayah pesisir desa Duwet, dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di desa Duwet melalui mangrove. Tingkat pendidikan terakhir dari informan NA ialah Sekolah Menengah Atas (SMA)

4. Informan Mastuki (MS)

Informan Mastuki merupakan tokoh agama masyarakat setempat. Informan MS sebagai seorang ustad di wilayah setempat yang dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi masyarakat setempat. Tokoh agama dipilih sebagai informan pokok karena sebagian besar masyarakat setempat beragama islam dan masyarakat di desa Duwet termasuk dalam kategori masyarakat patron-klien yakni masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap pihak yang dipandang memiliki posisi lebih tinggi yang salah satunya adalah tokoh agama. Tingkat pendidikan terakhir informan MS adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Beberapa informan pokok tersebut merupakan informan yang terlibat secara langsung dalam program dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti secara objektif dan valid.

Penelitian ini juga menggunakan informan tambahan yang memiliki kriteria yaitu memiliki pengetahuan mengenai objek penelitian, bertempat tinggal di lokasi sekitar penelitian, dapat memberikan keterangan mengenai objek penelitian secara jelas dan objektif, memberikan keterangan sebagai pihak lain disamping pihak yang ditunjuk sebagai informan pokok, serta dapat memberikan keterangan yang tidak dikuasai oleh informan pokok. Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan tambahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Informan Heri (HI)

Informan Heri merupakan penduduk di sekitar desa Duwet yang saat ini memiliki jabatan sebagai ketua program pemberdayaan masyarakat melalui mangrove di desa Duwet. Tingkat pendidikan terakhir informan HI adalah Sarjana (S1).

2) Informan Heru (HR)

Informan Heru merupakan penduduk luar desa Duwet, namun memiliki kepedulian yang tinggi untuk memperbaiki kondisi pesisir terutama kondisi masyarakat setempat. Informan HR berperan sebagai ketua lembaga swadaya masyarakat Simphoni Akar Rumput (SAR) . Tingkat pendidikan terakhir dari informan HR adalah Sarjana (S1)

3) Informan Wiyono (WY)

Informan Wiyono merupakan salah satu pengurus lembaga Simphoni Akar Rumput (SAR) yang masih aktif dan merupakan salah satu pendiri lembaga tersebut sehingga dipilih sebagai informan tambahan dalam penelitian ini. Tingkat pendidikan terakhir informan WY adalah Sarjana (S1).

3.5 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Menurut Satori dan Komariah (2014:103), jika dilihat dari *setting*-nya maka data dapat dikumpulkan menggunakan dua jenis sumber data yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah

sumber yang memberikan data dan informasi secara langsung kepada peneliti, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data dan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Penelitian kualitatif salah satunya sangat bergantung terhadap hasil pengamatan langsung peneliti terhadap objek penelitian sehingga dalam melaksanakan observasi peneliti harus benar-benar melakukan pengamatan secara objektif di lapangan agar data hasil yang diperoleh merupakan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Husaini dan Purnomo (2009:52), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dan menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol kendalanya (realibilitas) dan keshahihannya (validitasnya).

Metode observasi terdiri dari beberapa jenis yang memiliki kriteria kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dipilih sesuai kebutuhan dalam penelitian. Menurut Moleong (2016:24-227), jenis- jenis observasi terdiri dari:

- a) Observasi Partisipatif, dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari objek yang sedang diteliti atau orang yang sedang diamati. Peneliti melakukan pengamatan saat terlibat langsung dengan kegiatan objek yang sedang diteliti sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap, sesuai dengan fakta yang ada, dan peneliti dapat mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak;
- b) Observasi Terus Terang atau Tersamar, yakni jenis observasi yang ketika peneliti melakukan pengamatan menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Namun, dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan observasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya data yang sedang dicari merupakan data yang sedang dirahasiakan dan jika peneliti berterus terang kemungkinan besar tidak akan memperoleh data yang diinginkan;

- c) Observasi Tak Berstruktur. Dalam penelitian kualitatif, biasanya belum dipersiapkan secara sistematis apa yang akan diobservasi karena fokus penelitian masih belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama proses observasi sedang berlangsung. Pengamatan yang dilakukan peneliti tidak menggunakan instrumen yang baku tetapi hanya menggunakan rambu-rambu pengamatan.

Penelitian ini menggunakan jenis observasi terus terang atau tersamar. Penggunaan observasi terus terang digunakan karena salah satu lokasi observasi penelitian adalah lembaga, sehingga tidak memungkinkan untuk memperoleh data tertulis maupun dokumen-dokumen penting lembaga yang dibutuhkan dalam penelitian jika menyembunyikan identitas asli peneliti. Sedangkan penggunaan observasi tersamarkan dilakukan untuk menghindari data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan. Dalam artian bahwa jika peneliti berterus terang maka kemungkinan peneliti tidak di ijin untuk melakukan observasi dan tidak akan mendapatkan data yang dibutuhkan, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut peneliti menyiapkan metode observasi tersamar yang akan digunakan jika sewaktu-waktu peneliti memerlukannya.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilaksanakan melalui metode tanya jawab antar peneliti dengan informan yang dipilih mengenai objek penelitian sehingga data yang didapat berupa data deskriptif dan disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis. Menurut Moleong (2016:135), wawancara merupakan percakapan oleh dua pihak dengan tujuan tertentu yang diharapkan pihak yang diwawancara dapat memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Kegunaan wawancara adalah untuk mendapatkan data dari sumber primer, sebagai pelengkap, dan sebagai penguji hasil pengumpulan data lainnya (Husaini dan Purnomo, 2009:55).

Sedangkan, Esterberg dalam Sugiyono (2016:228) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Menurut Esterberg, jenis wawancara ada tiga yakni sebagai berikut: (1) wawancara terstruktur, yaitu jenis wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang dibutuhkan dan akan diperoleh. Sebelum mengumpulkan data, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. (2) Wawancara jenis kedua adalah wawancara semi terstruktur, yakni wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. (3) Jenis wawancara yang ketiga adalah wawancara tidak berstruktur, yakni wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Peneliti memilih jenis wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memperoleh data secara lebih terbuka dengan meminta pendapat dan ide dari pihak yang diwawancarai, selain itu agar data yang diperoleh masih sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Peneliti sebelum melakukan wawancara akan mencatat pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan diajukan saat wawancara, namun pertanyaan tersebut akan terus berkembang selama proses wawancara berlangsung di lapangan atau lokasi penelitian.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa foto, gambar hidup, sketsa, patung, film, biografi, kebijakan, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai pelengkap data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Senada dengan ini Guba dan Lincoln dalam Moleong (2012:161) menyatakan bahwa dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film. Kegunaan dokumentasi adalah untuk menguji dan menafsirkan data yang sebelumnya diperoleh peneliti. Moleong (2016:230)

menyatakan beberapa alasan mengapa studi dokumen berguna bagi penelitian kualitatif, diantaranya sebagai berikut : karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong pencarian data lain, berguna sebagai bukti untuk suatu penguji, berguna dan sesuai karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks, relatif murah dan tidak sukar ditemukan, hanya membutuhkan waktu, hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka penelitian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Mangrove di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo (Studi kasus pada Lembaga Swadaya Masyarakat Simphoni Akar Rumpu) menggunakan teknik dokumentasi sebagai salah satu metode pengumpulan data. Pemilihan metode dokumentasi dalam penelitian ini dikarenakan pemerintahan desa dan lembaga swadaya masyarakat merupakan salah satu objek penelitian yang mempertegas bahwa bukti-bukti berupa dokumen selalu merupakan data dan informasi pokok yang dimiliki oleh instansi-instansi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikan sehingga akan diperoleh suatu temuan terkait dengan fokus atau masalah yang ingin dicari jawabannya. Data yang telah terkumpul dari proses pengumpulan data, akan dijabarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori tertentu dan menguraikan atau menafsirkannya. Tahap analisa data bertujuan untuk memudahkan dalam mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang bersifat kualitatif, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat secara dipisah-pisahkan menurut katagori, yang nantinya dapat memperoleh kesimpulan secara rasional dan obyektif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data menurut Miles & Huberman (1992:17); dalam Idrus (2009:148) yang terdiri dari tiga alur yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap pertama

reduksi data yaitu, data mentah hasil wawancara di catat secara detail untuk dipilih dengan cara memilah data, disederhanakan, dan difokuskan data yang diperoleh oleh peneliti. Tahap kedua adalah penyajian data yang terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun kemudian dicari kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Kemudian, peneliti melakukan proses reduksi data yang dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafis, bagan, dan teks naratif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, artinya data yang telah disajikan kemudian akan ditarik kesimpulannya. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dan telah dianalisis sehingga dapat dijelaskan dari permasalahan yang dikemukakan.

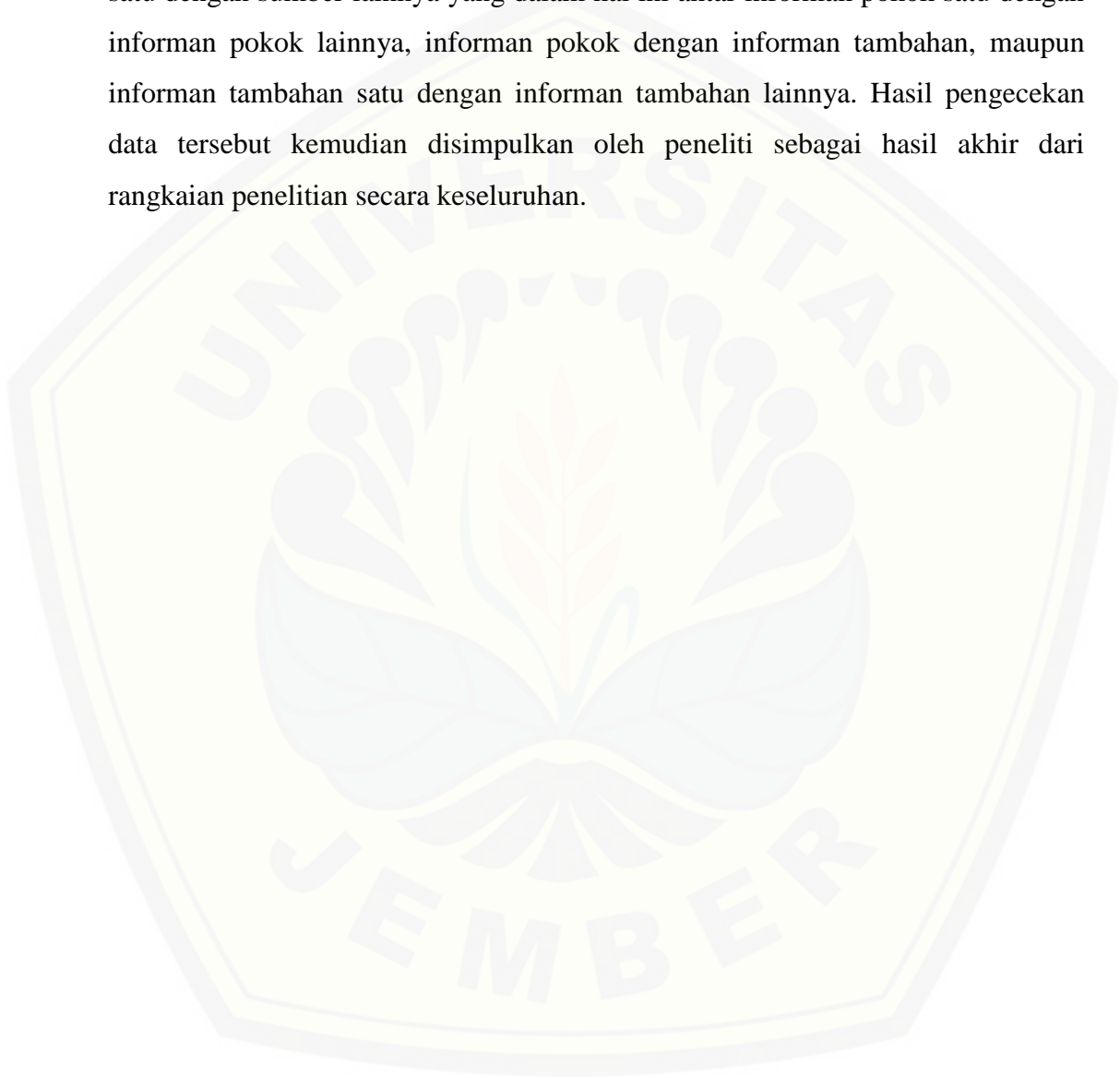
3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting karena dibutuhkan untuk mengukur kebenaran data agar dapat dipertanggung jawabkan. Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis akan dapat menentukan kebenaran dalam penelitian. Teknik triangulasi menjadi pilihan peneliti dalam menentukan keabsahan data yang didapatkan. Menurut Sugiyono (2008:273), triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Tujuan dari teknik triangulasi tidak hanya pada substansial kebenaran tentang beberapa fenomena atau realitas sosial yang ditangkap, tetapi lebih pada meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2014:85).

Jenis-jenis triangulasi menurut Satori dan Komariah (2014:56) yakni : Triangulasi sumber, yakni cara meningkatkan kepercayaan penelitian dengan mencari data dari sumber yang beragam dan saling terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber. Jenis yang kedua adalah triangulasi waktu, peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman, dan ketepatan/kebenaran suatu data dengan melakukan triangulasi waktu. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Triangulasi yang ketiga adalah triangulasi Teknik yakni penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi

teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber dikarenakan peneliti ingin berfokus pada data yang diperoleh dengan membandingkan data dari sumber satu dengan sumber lainnya yang dalam hal ini antar informan pokok satu dengan informan pokok lainnya, informan pokok dengan informan tambahan, maupun informan tambahan satu dengan informan tambahan lainnya. Hasil pengecekan data tersebut kemudian disimpulkan oleh peneliti sebagai hasil akhir dari rangkaian penelitian secara keseluruhan.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemberdayaan masyarakat melalui mangrove di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga Simphoni Akar Rumput (SAR) terdiri dari :
 - a. Kegiatan uji coba kopi rasa mangrove, yang bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat mengenai pemanfaatan buah mangrove dan memberikan inovasi pengolahan buah mangrove menjadi suatu produk yang bernilai tinggi.
 - b. Pelatihan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Produksi Kerupuk Kerang Dan Abon Ikan Tongkol, diikuti oleh dua kelompok perempuan di desa Duwet yang bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat setempat agar nantinya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi mereka melalui pemanfaatan biota laut disekitar mangrove.
 - c. Bantuan Modal Bahan Baku dan Alat Produksi, berasal dari lembaga *Mangroves For the Future* (MFF) berupa bahan baku, modal bantuan dana, dan alat-alat produksi kerupuk dan abon.
 - d. Pengoptimalan Fungsi Lembaga;
Lembaga sosial menjadi fokus utama dalam kegiatan ini karena merupakan lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat setempat dan berpotensi meningkatkan keberdayaan masyarakat.
2. Manfaat kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat desa Duwet yakni sebagai berikut :
 - 1) Manfaat terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat desa Duwet berpotensi meningkat;

- a) Kesejahteraan sosial-ekonomi individu, rumah tangga, dan masyarakat desa Duwet berpotensi mengalami peningkatan yang ditandai dengan adanya upaya untuk meningkatkan kemandirian dan orientasi kewirausahaan masyarakat yang sudah dilakukan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan produksi kerupuk kerang dan abon ikan tongkol, bantuan bahan baku, bantuan alat-alat produksi, serta uji coba kopi rasa mangrove yang berpotensi menjadi salah satu produk unggulan masyarakat setempat;
 - b) Kebutuhan primer dan sekunder masyarakat di desa Duwet saat ini sudah mulai terpenuhi dan berpotensi untuk terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan;
 - c) Kondisi sumberdaya manusia semakin membaik ditandai dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai tumbuhan mangrove dan manfaatnya baik untuk keselamatan ekosistem pesisir maupun untuk kehidupan mereka;
 - d) Sedangkan nilai tabungan dan investasi masyarakat belum dapat dievaluasi perkembangannya sebagai manfaat dari implementasi program dan masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat peningkatan nilai tabungan dan investasi masyarakat di desa Duwet;
- 2) Kelembagaan ekonomi yang ada belum berfungsi optimal dan masih membutuhkan pengoptimalan fungsi lembaga;
 - 3) Kelembagaan sosial yang ada di masyarakat sudah berfungsi optimal sesuai dengan peranannya di masyarakat;
 - 4) Potensi sumber daya lingkungan pesisir desa Duwet meningkat dan berpotensi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan tumbuhnya tanaman mangrove di sepanjang pesisir pantai Pathek yang berpotensi untuk memperbaiki ekosistem pesisir yang rusak;

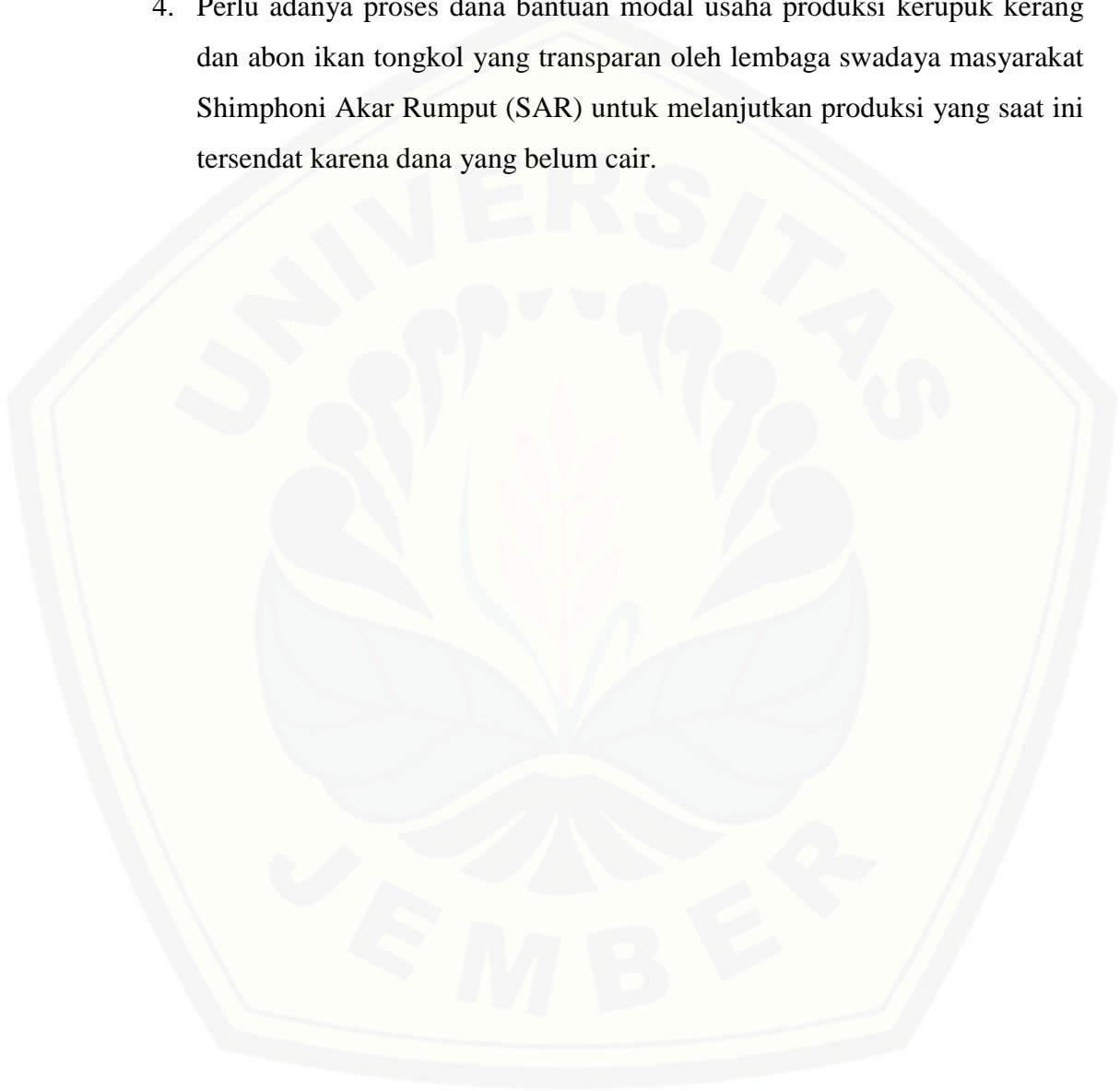
- 5) Kemampuan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yakni informasi dan kapital sudah dapat diakses masyarakat dengan baik. Namun, akses terhadap teknologi terutama akses teknologi produksi masih belum optimal diakses masyarakat serta akses terhadap pasar masih sangat minim sehingga masih butuh bimbingan strategi pemasaran yang baik dan teknologi produksi yang tepat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pasar.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi masyarakat desa Duwet berpotensi untuk mengalami peningkatan kesejahteraan sebagai manfaat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalui mangrove dalam program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir, meskipun ada beberapa hal yang kurang optimal seperti akses pasar, akses teknologi produksi, tingkat tabungan dan investasi masyarakat, serta akses masyarakat terhadap lembaga ekonomi sehingga masih membutuhkan waktu yang cukup untuk mengoptimalkannya. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan melalui mangrove sudah sangat sesuai untuk menjawab permasalahan masyarakat di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo dan dapat dilanjutkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

5.2 SARAN

1. Perlu adanya peningkatan fungsi lembaga ekonomi oleh pemerintah desa setempat agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses lembaga ekonomi yang ada dibandingkan sumber ekonomi dari pihak patron dan bank swasta yang tidak jarang memiliki persyaratan dan risiko besar yang sangat merugikan masyarakat;
2. Perlu adanya pembinaan oleh lembaga swadaya masyarakat Simponi Akar Rumput (SAR) mengenai strategi pemasaran yang baik kepada masyarakat terutama kepada kelompok perempuan yang terlibat dalam kegiatan produksi kerupuk kerang dan abon ikan tongkol sehingga dapat mengoptimalkan pemasaran dan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat;

3. Perlu adanya bimbingan dan arahan teknologi produksi yang baik oleh lembaga swadaya masyarakat Simphoni Akar Rumput (SAR) kepada masyarakat yang aktif produksi kerupuk dan abon untuk mengoptimalkan produksi kerupuk kerang dan abon ikan tongkol di wilayah setempat;
4. Perlu adanya proses dana bantuan modal usaha produksi kerupuk kerang dan abon ikan tongkol yang transparan oleh lembaga swadaya masyarakat Shimphoni Akar Rumput (SAR) untuk melanjutkan produksi yang saat ini tersendat karena dana yang belum cair.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, I. R. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Bosire, J. O, Guebas, dkk. 2008. *Functionality of Restored Mangroves: A Review. Journal Aquatic Botany* 89 : 251–259
- Chambers, R. 1987. *Pembangunan Desa : Mulai dari Belakang*. Jakarta : LP3ES
- Dahuri, Rohmin, dkk. 2001. *Strategi Penyelamatan Sumberdaya Alam, Pesisir dan Laut*. Jakarta : Rineka Cipta
- Daljuni, N. 1990. *Pokok Pokok Klimatologi*. Bandung : Penerbit Alumni Ewussie
- J Yanney. 1990. *Pengantar Ekologi Tropika*. Bandung : Penerbit ITB
- Granek, E & Ruttenberg. 2008. *Changes in Biotic and Abiotic Processes Following Mangrove Clearing. Journal Estuarine Coastal and Shelf Science* 80: 555–562
- Haba, J. dkk. 2016. *Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Haikal. 2008. *Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Han, W, dkk. 2003. *Shellfish and Fish Biodiversity of Mangrove Ecosystems in Leizhou Peninsula China. Journal of Coastal Development* 7 (1): 21 – 29
- Harahab, N. 2010. *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove dan Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Hogart, P.J. 2007. *The Biology of Mangrove and Seagrass*. Oxford University Press Inc. New York
- Huraerah, A. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan)*. Bandung : Humaniora
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Erlangga
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta : DIA FISIP UI

- Jakaria. 2000. *Analisis Pengelolaan Hutan Mangrove Kearah Wilayah Pantai Berkelanjutan dan Dampaknya Kepada Kesejahteraan Penduduk di Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Khazali, M, Noor, dan Suryadiputra. 1999. *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia. Ditjen PKA dan Wetlands International. Indonesia Programme*
- Kotler, Philip Phd. 2002. *Marketing Professional Service*. Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
- Kusmana, C. 1995. *Habitat Hutan Mangrove dan Biota*. Laboratorium Ekologi Hutan. Fakultas Kehutanan. Bogor : Institut Pertanian Bogor
- Kusmana, C. 2003. *Manajemen Hutan Mangrove di Indonesia. Bogor : Laboratorium Ekologi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor*
- Kusnadi. 2006b. *6 Tahun Program PEMP : Sebuah Refleksi*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan
- Kusnadi. 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta : LKiS.Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PSKP Jember
- Kusnadi.2002. *Konflik Sosial Nelayan : Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta :LKiS Yogyakarta.
- Kusnadi.2006a. *Perempuan Pesisir*.Yogyakarta : LKiS
- Kusnadi.2009. *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*.Jember : Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Lembaga Penelitian UNEJ & Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA
- Mardikanto.2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Martinuzzi S, W.A Gould, A.Lugo dan E Medina, 2009. *Conversion and Recovery of Puerto Rican Mangroves: 200 Years of Change. Journal Forest Ecology and Management 257: 75–84*
- Moleong, L.J.2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nybakken,J.W.1982. *Marine Biology; An Introduction*, Publishing company Belmon California.USA

- Odum. 1993. *Dasar Dasar Ekologi (Terjemahan oleh : Tjahyono Samingan dan Srigandono)*.Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Purnobasuki, H. 2005. *Tinjauan Perspektif Hutan Mangrove*.Surabaya : Airlangga University Press
- Puspitaningasih.2012. *Mengenal Ekosistem Laut dan Pesisir*.Bogor : Pustaka Sains
- Salm dan Clark ,1984.*Marine and Coastal protected areas; a guide for planners and managers*. IUCN. Gland, Switzerland
- Satria, A.2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Setyawan A.D dan K.Winarno. 2006. *Permasalahan Konservasi Ekosistem Mangrove di Pesisir Kabupaten Rembang Jawa Tengah*. Jurnal Biodiversita 7 (2): 159-163
- Soemarwotto,O.1991. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*.Djambatan. Jakarta
- Soetikno, S. 1990. *Ekologi Gulma*. Jakarta.: PT Gramedia Pustaka Utama
- Soetomo.2015. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Soleh, C.2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*.Bandung : Fokus media
- Sugiyono.1997.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.2008.*Metode Penelitian & Pengembangan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.2016.*Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*.Bandung : Alfabeta
- Suharto, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Refika Aditama

Suharto, E.1997.*Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Spektrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS)

Sunarto.2008. *Peranan Ekologis dan Antropogenis Ekosistem Mangrove*.Karya Ilmiah. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Jatinangor

Suyanto, Bagong dan Sutinah.2005.*Metode Penelitian Sosial*.Jakarta : Prenada Media

Triwanto, J. 2012. *Konservasi Lahan Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*.Malang : Universitas Muhammadiyah Malang

Usman, H dan P.S. Akbar.2009. *Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta : PT Bumi Aksara

Wahyudin, Y.2005. *Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut*.Wacana pada kolom Teras Warta Pesisir dan Laut Edisi Nomor 01/Th.IV/2005

Wibisono. 2005. *Pengantar Ilmu Kelautan*. PT. Grasindo. Jakarta. Hal. : 170-187

Peraturan Perundang Undangan

Kementerian Republik Indonesia. 1990. Keputusan Presiden Nomor 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Jakarta : Kementerian Republik Indonesia

Kementerian Republik Indonesia. 2012. Perpres 121/2012 tentang Rehabilitasi Pesisir. Jakarta : Kementerian Republik Indonesia

Kementerian Republik Indonesia. 2012. Perpres 73/2012 tentang Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SPEM).Jakarta: Kementerian Republik Indonesia

Jurnal

Firiah, Eka.2015.*Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pemanfaatan Tumbuhan Mangrove Sebagai Pangan Alternatif untuk Menghadapi Ketahanan Pangan*. IAIN Syekh Nurjani Cirebon

Pontoh, O .2011.*Peranan Nelayan Terhadap Rehabilitasi Ekosistem Hutan Bakau (Mangrove)*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

Purwowibowo dan Nur Dyah. G. 2016. *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Hutan Mangrove melalui Community Development*. Bandung : Redaksi Bina Hukum Lingkungan

Sutrisno.2015. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati*

Roziqin, M .2008.*Pemeliharaan Ekosistem Laut Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Kearifan Lokal*. Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Internet

Anwar, C, Gunawan, dan Hendra.2007. *Peranan Ekologis dan Sosial Ekonomis Hutan Mangrove dalam Mendukung Pembangunan Wilayah Pesisir*.[Http://Www.Dephut.Go.Id/Files/Chairil_Hendra.Pdf](http://Www.Dephut.Go.Id/Files/Chairil_Hendra.Pdf).Diakses pada tanggal 25 April 2017

Bhirawa, H. 2016. Dirangkul Pendonor MFF Thailand , Berhasil Tanam Ribuan Pohon Mangrove. <http://berita.baca.co.id>. Diakses pada tanggal 25 April 2017

FAO. 2009. *Community-Based Mangrove Rehabilitation and Ecotourism Development*. <http://www.fao.org/docrep/007/ae213e/ae213e06.htm> (Online) diakses tanggal 28 April 2017

Lukito, O. 2010.Kemiskinan (Masih) Mendera Pesisir) <http://news.detik.com>. Diakses pada tanggal 25 April 2017

Purnomo, S.H. *Tingkat Kerusakan Mangrove di Jawa Timur*. Antarajatim.com (diakses pada tanggal 15 mei 2017)

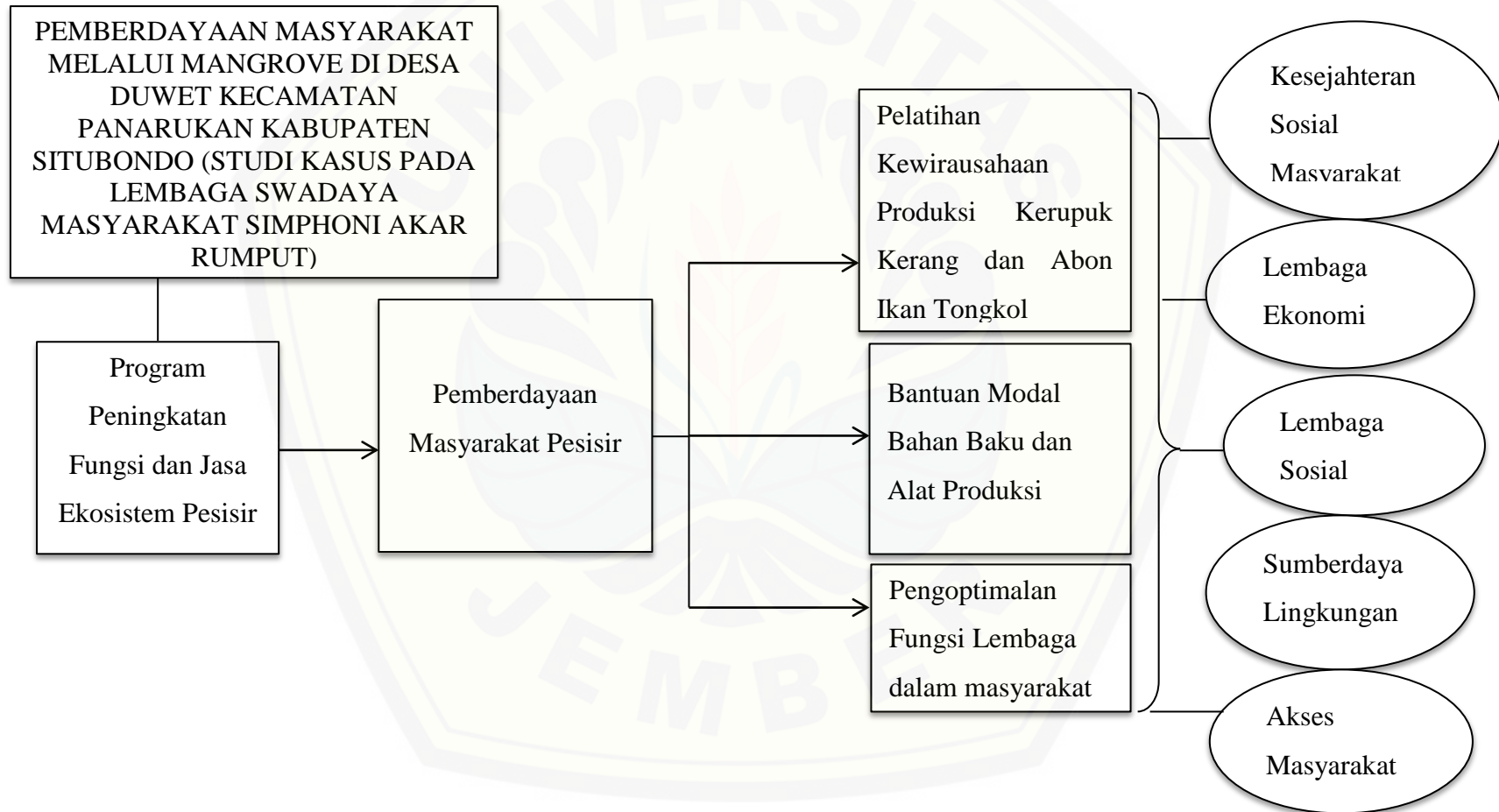
Rahardjo, C. 2002. *Areal Tanaman Bakau Pantai Utara Situbondo Memprihatinkan*.<http://news.liputan6.com>. Diakses pada tanggal 25 April 2017.<http://profil-pulau.blogspot.co.id/2008/04/provinsi-jawa-timur-kabupaten-situbondo.html>. Diakses pada tanggal 25 April 2017

Ujung Kulon Conservation Society. 2010. *Manfaat Penanaman Mangrove*. Http://Ucsindonesia.Org/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=74:Manfaat-Penanaman-Mangrove&Catid=1:Latest&Itemid=117 (diakses pada 19 mei2017)

LAMPIRAN A. TAKSONOMI PENELITIAN

TAKSONOMI PENELITIAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MANGROVE DI DESA DUWET KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO (STUDI KASUS PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SIMPHONI AKAR RUMPUT)



LAMPIRAN B. GUIDE INTERVIEW

PEDOMAN WAWANCARA

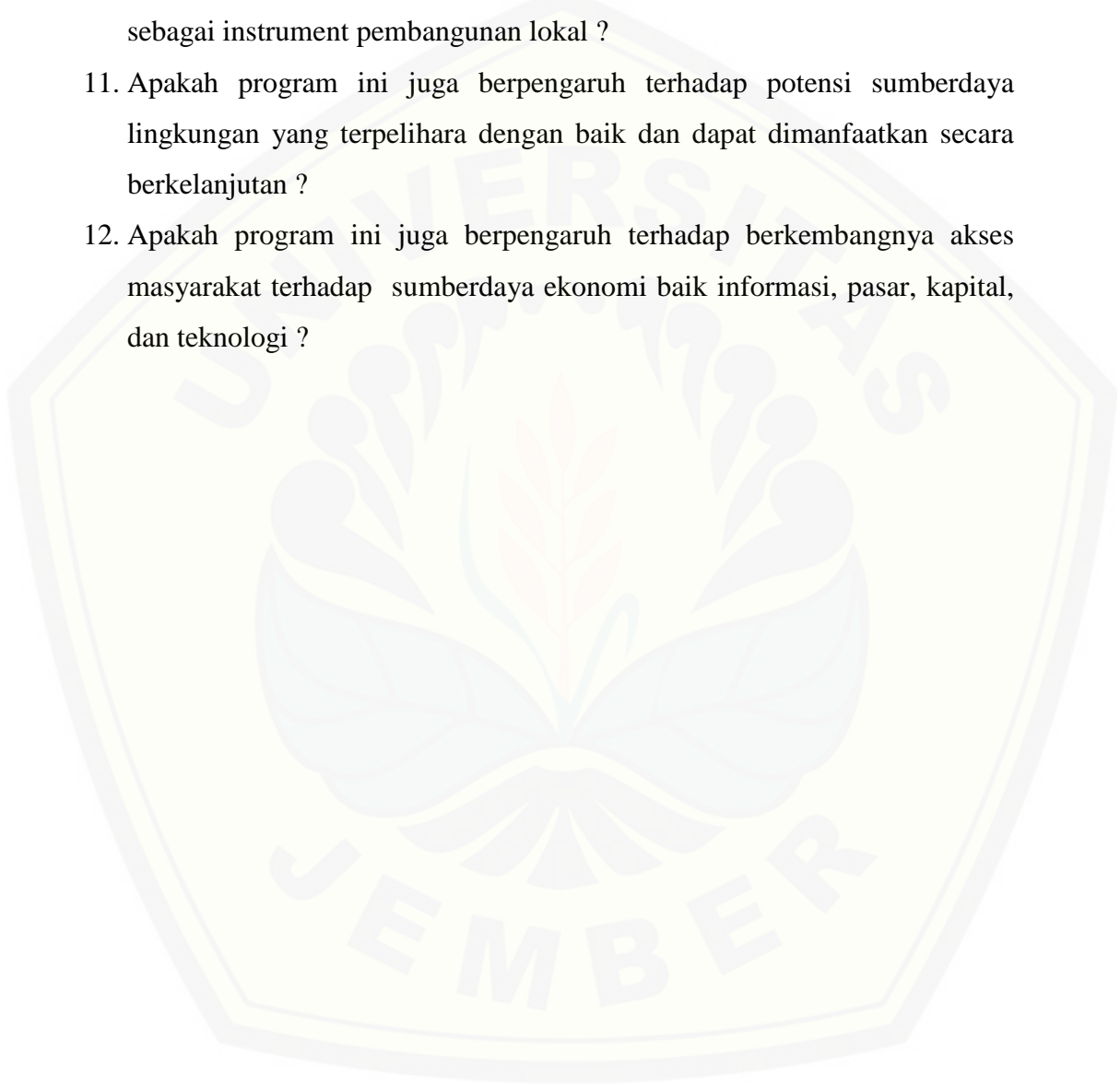
Guide Interview

WAWANCARA INFORMAN POKOK

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Jabatan :
Alamat :

1. Apa tujuan diadakannya program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir ?
2. Apa sasaran program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir ?
3. Siapa pelaksana program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir ?
4. Apa saja bentuk program yang diberikan kepada masyarakat dalam program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir ?
5. Apa saja hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir ?
6. Bagaimana program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir menurut anda (persepsi) ?
7. Apa saja hambatan pelaksanaan program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir ?
8. Apakah program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial masyarakat pesisir?
 - a) Bagaimana dengan perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat ?
 - b) Bagaimana dengan orientasi kewirausahaan masyarakat ?
 - c) Bagaimana dengan nilai tabungan dan investasi ?

- d) Bagaimana dengan kebutuhan pokok maupun sekunder masyarakat ?
 - e) Bagaimana dengan kualitas sumber daya manusia ?
9. Apakah program ini juga berpengaruh terhadap kelembagaan ekonomi sehingga berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil ?
 10. Apakah program ini juga berpengaruh terhadap kelembagaan sosial sebagai instrument pembangunan lokal ?
 11. Apakah program ini juga berpengaruh terhadap potensi sumberdaya lingkungan yang terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan ?
 12. Apakah program ini juga berpengaruh terhadap berkembangnya akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi baik informasi, pasar, kapital, dan teknologi ?



PEDOMAN WAWANCARA

Guide Interview

WAWANCARA INFORMAN TAMBAHAN

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Jabatan :
Alamat :

1. Bagaimana program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir menurut anda (persepsi) ?
2. Siapa pelaksana program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir ?
3. Apa saja bentuk program yang diberikan kepada masyarakat dalam program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir ?
4. Apakah program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial masyarakat pesisir?
 - a) Bagaimana dengan perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat ?
 - b) Bagaimana dengan orientasi kewirausahaan masyarakat ?
 - c) Bagaimana dengan nilai tabungan dan investasi ?
 - d) Bagaimana dengan kebutuhan pokok maupun sekunder masyarakat ?
 - e) Bagaimana dengan kualitas sumber daya manusia ?
5. Apakah program ini juga berpengaruh terhadap kelembagaan ekonomi sehingga berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil ?
6. Apakah program ini juga berpengaruh terhadap kelembagaan sosial sebagai instrument pembangunan lokal ?
7. Apakah program ini juga berpengaruh terhadap potensi sumberdaya lingkungan yang terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan ?

8. Apakah program ini juga berpengaruh terhadap berkembangnya akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi baik informasi, pasar, kapital, dan teknologi ?



LAMPIRAN C. TRANSKIP WAWANCARA

	Data awal	Reduksi data	Triangulasi	Data display
Tujuan Program	<p>1. Sebenarnya kita hanya ingin agar pantai khususnya yang di Situbondo tidak mengalami abrasi</p> <p>2. Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dalam arti pekerjaan tambahan bagi masyarakat agar ada peningkatan, karena itu masih dalam tahap penanaman gak mungkin kan logikanya begitu. Kita harus nunggu beberapa tahun lagi, itupun kita harus melakukan tambal sulam karena memang faktor kerusakannya lebih parah dari pada tumbuhnya. Maka dari itu, dibutuhkan ketelatenan seorang programmer untuk sering melakukan komunikasi dengan masyarakat penerima manfaat. Jadi programmernya aku terus</p>	<p>1. Tumbuhnya mangrove sepanjang pantai Pathek yang berpotensi untuk mengurangi dan mencegah terjadinya abrasi pantai.</p> <p>2. Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dalam arti pekerjaan tambahan bagi masyarakat agar ada peningkatan, karena itu masih dalam tahap penanaman gak mungkin kan logikanya begitu. Kita harus nunggu beberapa tahun lagi, itupun kita harus melakukan tambal sulam karena memang faktor kerusakannya lebih parah dari pada tumbuhnya. Maka dari itu, dibutuhkan ketelatenan seorang programmer untuk sering melakukan komunikasi dengan masyarakat penerima manfaat. Jadi programmernya aku terus melakukan pembinaan, penyuluhan bagaimana melakukan tambal sulam itu walaupun sudah tidak ada anggaran, berarti kan kita harus memiliki.</p> <p>3. Menambah pengetahuan masyarakat mengenai pembibitan, penanaman, dan</p>	<p>Informasi tersebut telah di validasi oleh peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai fakta yang valid</p>	<p>Program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir memiliki tujuan utama untuk menjaga pesisir pantai di sekitar Situbondo dari abrasi yang sebelumnya sudah sering terjadi, selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pesisir setempat melalui pemberian upah pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berpotensi menumbuhkan jiwa kewirausahaan, serta menambah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mangrove untuk daerah pesisir pantai</p>

	<p>melakukan pembinaan, penyuluhan bagaimana melakukan tambal sulam itu walaupun sudah tidak ada anggaran, berarti kan kita harus memiliki.</p> <p>3. Menambah pengetahuan masyarakat mengenai pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove;</p> <p>4. Menambah pendapatan masyarakat melalui pemberian upah oleh lembaga MFF kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif melalui pembibitan, penanaman, dan perawatan;</p> <p>5. Tumbuhnya mangrove sepanjang pantai Pathek yang berpotensi untuk mengurangi dan mencegah terjadinya abrasi pantai.</p> <p>6. Pada dasarnya bagaimana menjaga ekosistem pesisir dan memperbaiki, soalnya di lokasi sering terjadi abrasi. Meskipun itu butuh waktu untuk menjamin keberhasilan, penanaman mangrove memang</p>	<p>perawatan mangrove;</p> <p>4. Menambah pendapatan masyarakat melalui pemberian upah oleh lembaga MFF kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif melalui pembibitan, penanaman, dan perawatan;</p>		
--	--	--	--	--

	partisipasi masyarakat harus ada karena kadangkala manusia yang jadi hama.			
Sasaran Program	<p>1. Untuk masyarakat desa Duwet terutama agar dapat memberdayakan masyarakat pesisir sebagai ekonomi tambahan ketika mangrove sudah tumbuh besar, maka otomatis habitat disitu ya seperti udang , kepiting itu akan bermanfaat bagi mereka sehingga ketika musim kemarau tidak lagi bingung mencari ikan.</p> <p>2. Sasarannya masyarakat mbak..lebih tepatnya mengenai mindset masyarakat tentang tumbuhan mangrove dan manfaatnya untuk mereka, karena memang dari dulu masyarakat disini apatis terhadap mangrove dan belum mengetahui manfaat mangrove untuk keberlanjutan hidup mereka.</p>	<p>1. Untuk masyarakat desa Duwet terutama agar dapat memberdayakan masyarakat pesisir sebagai ekonomi tambahan ketika mangrove sudah tumbuh besar, maka otomatis habitat disitu ya seperti udang , kepiting itu akan bermanfaat bagi mereka sehingga ketika musim kemarau tidak lagi bingung mencari ikan.</p> <p>2. Sasarannya masyarakat pesisir mbak..lebih tepatnya mengenai mindset masyarakat tentang tumbuhan mangrove dan manfaatnya untuk mereka, karena memang dari dulu masyarakat apatis terhadap mangrove dan belum mengetahui manfaat mangrove untuk keberlanjutan hidup mereka.</p>	<p>Kedua informasi tersebut telah di validasi oleh peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber sebagai fakta yang valid</p>	<p>Sasaran program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir adalah masyarakat sekitar lokasi rehabilitasi mangrove di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo terutama agar dapat memberdayakan mereka dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menanam mangrove dan beragam manfaatnya untuk mereka. Selain itu juga nantinya sebagai ekonomi tambahan ketika mangrove sudah tumbuh besar maka akan ditempati oleh beberapa biota laut seperti udang, ikan, kerang, dan lain sebagainya sehingga ketika musim kemarau masyarakat tidak bingung mencari ikan dilaut.</p>

Digital Repository Universitas Jember

Pelaksana Program	<p>1. Posisi Lembaga Swadaya Masyarakat Simphoni Akar Rumput (SAR) sebagai pelaksana program mbak karena memang program ini dari awal kan LSM SAR yang menggagas mbak..</p> <p>2. Yang lebih mengetahui kan pelaksana program ya,, kalo saya kan ketua LSM SAR sedangkan pelaksananya ya mereka anggota SAR dan para relawan.</p>	<p>1. Posisi Lembaga Swadaya Masyarakat Simphoni Akar Rumput (SAR) sebagai pelaksana program mbak karena memang program ini dari awal kan LSM SAR yang menggagas mbak..</p> <p>2. Yang lebih mengetahui kan pelaksana program ya,, kalo saya kan ketua LSM SAR sedangkan pelaksananya ya mereka anggota SAR dan para relawan</p>	Kedua informasi tersebut telah di validasi oleh peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber sebagai fakta yang valid	Pelaksana program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Simphoni Akar Rumput (SAR). Hal ini dikarenakan dari awal lembaga tersebut yang memprakarsai adanya program dengan mengajukan proposal kegiatan ke lembaga Mangrove the For Future (MFF) di Bangkok dengan latar belakang kondisi lingkungan pesisir pantai Pathek yang mengalami kerusakan cukup parah dan mengancam kesejahteraan penduduk.
Bentuk program	<p>1. Program di pesisir desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo ada dua bentuk program yaitu bantuan dana dari lembaga MFF untuk penghijauan daratan pesisir mnggunakan mangrove dan kegiatan produksi atau pemberdayaan masyarakat dengan mangrove yaitu</p>	<p>1. Program di pesisir desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo ada dua bentuk program yaitu bantuan dana dari lembaga MFF untuk penghijauan daratan pesisir mnggunakan mangrove dan kegiatan produksi atau pemberdayaan masyarakat dengan mangrove yaitu abon ikan tongkol dan kerupuk kerang yang diikuti dua kelompok perempuan yang masing-masing terdiri dari 15</p>	Kedua informasi tersebut telah di validasi oleh peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber sebagai fakta yang valid	Berdasarkan latar belakang adanya program ini yaitu kerusakan ekosistem pesisir pantai Duwet dikarenakan abrasi yang mengakibatkan tempat tinggal penduduk disekitar pantai mengalami pengikisan dan mengakibatkan jarak pantai dengan jalan sudah

	<p>abon ikan tongkol dan kerupuk kerang yang diikuti dua kelompok perempuan yang masing-masing terdiri dari 15 orang</p> <p>2. Program di pesisir desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo melaksanakan kegiatan utama yakni implementasi bantuan dana dari lembaga MFF untuk penghijauan daratan pesisir menggunakan mangrove</p> <p>3. Program di desa Duwet selain penanaman mangrove juga ada pemberdayaan untuk masyarakat sehingga masyarakat sekitar juga diharapkan ikut serta melestarikan mangrove dengan diberi kegiatan diluar mangrove yakni pembuatan kerupuk kerang dan abon ikan tongkol, serta bantuan modal bahan baku dan alat-alat produksi dari lembaga MFF sebagai kompensasi dari perawatan mangrove yang mereka</p>	<p>orang</p> <p>2. Program di pesisir desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo melaksanakan kegiatan utama yakni implementasi bantuan dana dari lembaga MFF untuk penghijauan daratan pesisir menggunakan mangrove</p> <p>3. Program di desa Duwet selain penanaman mangrove juga ada pemberdayaan untuk masyarakat sehingga masyarakat sekitar juga diharapkan ikut serta melestarikan mangrove dengan diberi kegiatan diluar mangrove yakni pembuatan kerupuk kerang dan abon ikan tongkol, serta bantuan modal bahan baku dan alat-alat produksi dari lembaga MFF sebagai kompensasi dari perawatan mangrove yang mereka lakukan.</p> <p>4. Program ini kelanjutan dari yang di desa Peleyan, itu kerjasama atau mendapatkan donasi dari MFF itu yang berkepentingan untuk mempertahankan paru-paru bumi melalui pembiayaan mangrove. Sebelumnya kita mencapai keberhasilan sehingga ditahun selanjutnya kita mendapatkan bantuan lagi. Perbedaan program ini dengan yang di peleyan adalah di desa Peleyan</p>	<p>semakin sempit sehingga mengancam keselamatan penduduk dan sumber pendapatan mereka terutama yang bekerja sebagai nelayan dan berjualan di areal wisata pesisir pantai. Maka dari itu, bentuk program dalam hal ini adalah selain penghijauan ekosistem pesisir melalui rehabilitasi mangrove, masyarakat juga mendapatkan kegiatan pemberdayaan dengan membentuk dua kelompok perempuan yang masing-masing terdiri dari 15 orang yang kemudian diberi pelatihan produksi abon ikan tongkol dan kerupuk kerang serta diberi bantuan modal produksi berupa alat-alat produksi dari lembaga MFF sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat untuk merawat dan memanfaatkan ekosistem mangrove yang sudah ada</p>
--	---	--	---

	<p>lakukan</p> <p>4. Program ini kelanjutan dari yang di desa Peleyan, itu kerjasama atau mendapatkan donasi dari MFF itu yang berkepentingan untuk mempertahankan paru-paru bumi melalui pembiayaan mangrove. Sebelumnya kita mencapai keberhasilan sehingga ditahun selanjutnya kita mendapatkan bantuan lagi. Perbedaan program ini dengan yang di peleyan adalah di desa Peleyan hanya ada kegiatan pembibitan dan penanaman mangrove. Namun, di Pathek selain juga ada penanaman juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat</p> <p>5. Dalam pelaksanaan program kemarin, selain penanaman juga ada pemberdayaan untuk masyarakat sehingga masyarakat sekitar juga diharapkan ikut serta</p>	<p>hanya ada kegiatan pembibitan dan penanaman mangrove. Namun, di Pathek selain juga ada penanaman juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat</p> <p>5. Dalam pelaksanaan program kemarin, selain penanaman juga ada pemberdayaan untuk masyarakat sehingga masyarakat sekitar juga diharapkan ikut serta melestarikan mangrove, dengan diberi kegiatan diluar mangrove yaitu pembuatan kerupuk kerang dan abon ikan tongkol serta upaya untuk mengoptimalkan fungsi lembaga yang ada terutama lembaga sosial agar mudah diakses masyarakat</p> <p>6. Dalam program juga ada kegiatan produksi atau pemberdayaan masyarakat dengan mangrove yaitu abon ikan tongkol dan kerupuk kerang yang diikuti dua kelompok perempuan yang masing-masing terdiri dari 15 orang</p> <p>7. Program di desa Duwet selain penanaman mangrove juga ada pemberdayaan untuk masyarakat sehingga masyarakat sekitar juga diharapkan ikut serta melestarikan mangrove dengan diberi kegiatan diluar mangrove yakni pembuatan</p>		<p>dengan sebaik-baiknya. Selain itu, dalam program juga diadakan pengoptimalan fungsi lembaga agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat terutama lembaga sosial.</p>
--	---	--	--	---

	<p>melestarikan mangrove, dengan diberi kegiatan diluar mangrove yaitu pembuatan kerupuk kerang dan abon ikan tongkol serta upaya untuk mengoptimalkan fungsi lembaga yang ada terutama lembaga sosial agar mudah diakses masyarakat</p> <p>6. Dalam program juga ada kegiatan produksi atau pemberdayaan masyarakat dengan mangrove yaitu abon ikan tongkol dan kerupuk kerang yang diikuti dua kelompok perempuan yang masing-masing terdiri dari 15 orang</p> <p>7. Program di desa Duwet selain penanaman mangrove juga ada pemberdayaan untuk masyarakat sehingga masyarakat sekitar juga diharapkan ikut serta melestarikan mangrove dengan diberi kegiatan diluar mangrove yakni pembuatan kerupuk kerang dan abon ikan tongkol</p>	<p>kerupuk kerang dan abon ikan tongkol</p> <p>8. Program kemarin tidak hanya ada pelatihan, tapi juga bantuan bahan baku dan alat-alat produksi sehingga nanti mereka bisa terus melanjutkan produksi dan dapat memasarkannya ke luar pesisir mba</p> <p>9. Tidak hanya pelatihan, masyarakat juga diberi bantuan alat-alat produksi dari lembaga MFF sebagai kompensasi dari perawatan mangrove yang mereka lakukan</p> <p>10. Program itu juga melibatkan lembaga setempat, terutama lembaga sosial. Salah satunya dengan mulai adanya di tiap-tiap pengajian himbauan tentang pentingnya menanam mangrove dan manfaatnya untuk lingkungan mereka serta untuk masyarakat sendiri</p> <p>11. Lembaga sosial memang terlibat terutama dalam sosialisasi program dan manfaat mangrove, tapi kalo lembaga ekonomi masih belum ya mba.. kemarin itu yang memang terlibat ya lembaga seperti arisan dan pengajian di masyarakat</p>		
--	--	--	--	--

	<p>8. Program kemarin tidak hanya ada pelatihan, tapi juga bantuan bahan baku dan alat-alat produksi sehingga nanti mereka bisa terus melanjutkan produksi dan dapat memasarkannya ke luar pesisir mba</p> <p>9. Tidak hanya pelatihan, masyarakat juga diberi bantuan alat-alat produksi dari lembaga MFF sebagai kompensasi dari perawatan mangrove yang mereka lakukan</p> <p>10. Program itu juga melibatkan lembaga setempat, terutama lembaga sosial. Salah satunya dengan mulai adanya di tiap-tiap pengajian himbuan tentang pentingnya menanam mangrove dan manfaatnya untuk lingkungan mereka serta untuk masyarakat sendiri</p> <p>11. Lembaga sosial memang terlibat terutama dalam sosialisasi program dan manfaat mangrove, tapi</p>			
--	--	--	--	--

	<p>kalo lembaga ekonomi masih belum ya mba.. kemarin itu yang memang terlibat ya lembaga seperti arisan dan pengajian di masyarakat</p>			
<p>Hasil pelaksanaan program</p>	<p>1. Untuk saat ini dari sedikit mangrove yang hidup itu tanah yang ada disini itu sudah membentuk penggundukan-penggundukan tanah di depannya mangrove itu. 2. Mindset masyarakat berubah yang tadinya dia apatis terhadap mangrove itu dia mengatakan kok ternyata ada ikan-ikan, sebelumnya tidak ada, itu kata mereka yaa.. yang tadinya dia khawatir terhadap ombak yang besar itu dia udah agak mengurangi walaupun tumbuhnya masih kecil 3. Sebanyak 45.000 tanaman mangrove tumbuh sepanjang kawasan pantai pathek dan desa Duwet kecamatan Panarukan</p>	<p>1. Untuk saat ini dari sedikit mangrove yang hidup itu tanah yang ada disini itu sudah membentuk penggundukan-penggundukan tanah di depannya mangrove itu. 2. Mindset masyarakat berubah yang tadinya dia apatis terhadap mangrove itu dia mengatakan kok ternyata ada ikan-ikan, sebelumnya tidak ada, itu kata mereka yaa.. yang tadinya dia khawatir terhadap ombak yang besar itu dia udah agak mengurangi walaupun tumbuhnya masih kecil 3. Sebanyak 45.000 tanaman mangrove tumbuh sepanjang kawasan pantai pathek dan desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo, menambah pengetahuan masyarakat mengenai pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove secara swadaya masyarakat, menambah pendapatan masyarakat melalui pemberian upah oleh MFF kepada masyarakat yang ikut</p>	<p>Dua informasi yang berbeda mengenai jumlah upah yang diterima oleh masyarakat telah di validasi oleh penulis menggunakan triangulasi sumber sehingga fakta yang valid yakni upah pembibitan dan penanaman mangrove untuk setengah hari yang diterima oleh masyarakat sebesar 30.000 per setengah hari hanya di desa Peleyan saja karena yang ikut</p>	<p>Hasil program diantaranya adalah tumbuhnya mangrove sepanjang pantai Pathek sekitar 45.000 batang di desa Duwet kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo yang mulai membentuk penggundukan-penggundukan tanah di depan mangrove, menambah pendapatan masyarakat melalui upah pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan mangrove dari lembaga MFF, mengubah mindset masyarakat secara perlahan mengenai pentingnya menanam dan merawat tumbuhan mangrove untuk keselamatan daerah pesisir</p>

	<p>kabupaten Situbondo, menambah pengetahuan masyarakat mengenai pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove secara swadaya masyarakat, menambah pendapatan masyarakat melalui pemberian upah oleh MFF kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif melalui pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove sekitar setengah hari 15.000 rupiah, untuk perlubangnya dihargai 200 rupiah, sementara untuk pemeliharannya perbulan 300.000 rupiah</p> <p>4. Hasil program secara langsung yakni melalui pemberian upah yang diterima oleh masyarakat pembibitan, penanaman, dan perawatan. Berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat setempat ekonominya berada dibawah rata-rata yang kerjanya sebagai nelayan</p>	<p>berpartisipasi aktif melalui pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove sekitar setengah hari 15.000 rupiah, untuk perlubangnya dihargai 200 rupiah, sementara untuk pemeliharannya perbulan 300.000 rupiah</p> <p>4. Hasil program secara langsung yakni melalui pemberian upah yang diterima oleh masyarakat pembibitan, penanaman, dan perawatan. Berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat setempat ekonominya berada dibawah rata-rata yang kerjanya sebagai nelayan dan buruh tani, dan sekarang sudah mulai banyak ikan, kepiting, dan udang.</p> <p>5. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembibitan dan penanaman mangrove menerima upah sebesar 30.000 rupiah per setengah hari sebanyak 12 orang yang ikut serta di desa peleyan sendiri</p> <p>6. Dari penanaman mangrove kemarin, sebanyak 45.000 tanaman mangrove tumbuh sepanjang kawasan pantai pathek di desa Duwet, menambah pengetahuan masyarakat mengenai pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove secara swadaya</p>	<p>serta hanya 12 orang, berbeda dengan desa Duwet yang melibatkan lebih banyak masyarakat sehingga upah untuk setengah hari sekitar 15.000 rupiah dan untuk perlubangnya dihargai 200 rupiah, sedangkan untuk pemeliharannya perbulan sebesar 300.000 rupiah. Sistem kerja dalam proses pembibitan, perawatan, dan penanaman mangrove dalam program ini menggunakan sistem borongan sehingga semakin sedikit yang bekerja</p>	<p>dan kesejahteraan mereka di masa yang akan datang salah satu manfaat dari tumbuhnya mangrove selain melindungi dari adanya abrasi adalah memancing habitat kerang dan udang sekitar mangrove yang dapat dijadikan sumber tambahan pendapatan masyarakat</p>
--	--	--	--	--

	<p>dan buruh tani, dan sekarang sudah mulai ada ikan, kepiting, dan udang.</p> <p>5. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembibitan dan penanaman mangrove menerima upah sebesar 30.000 rupiah per setengah hari sebanyak 12 orang yang ikut serta di desa peleyan sendiri</p> <p>6. Dari penanaman mangrove kemarin, sebanyak 45.000 tanaman mangrove tumbuh sepanjang kawasan pantai pathek di desa Duwet, menambah pengetahuan masyarakat mengenai pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove secara swadaya masyarakat, menambah pendapatan masyarakat melalui pemberian upah oleh MFF kepada masyarakat yang ikut aktif dalam pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove mba,,, jadi masyarakat disini tidak hanya untung karena pesisir</p>	<p>masyarakat, menambah pendapatan masyarakat melalui pemberian upah oleh MFF kepada masyarakat yang ikut aktif dalam pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove mba,,, jadi masyarakat disini tidak hanya untung karena pesisir yang diperbaiki tapi juga mereka mendapat upah untuk belanja kebutuhan sehari-hari mba...</p> <p>7. Tabungan masyarakat dapat dikatakan meningkat mba, yang dapat dilihat sekarang ya tanaman mangrove itu sendiri mba, dalam artian setelah mangrove tumbuh besar nantinya kan bisa bermanfaat bagi mereka, terutama biota laut yang ada disekitar mangrove misalnya mereka dapat menjualnya untuk tambahan pendapatan bagi mereka nanti.</p>	<p>maka upah yang diterima akan lebih besar</p>	
--	--	--	---	--

	<p>yang diperbaiki tapi juga mereka mendapat upah untuk belanja kebutuhan sehari-hari mba...</p> <p>7. Tabungan masyarakat dapat dikatakan meningkat mba, yang dapat dilihat sekarang ya tanaman mangrove itu sendiri mba, dalam artian setelah mangrove tumbuh besar nantinya kan bisa bermanfaat bagi mereka, terutama biota laut yang ada disekitar mangrove misalnya mereka dapat menjualnya untuk tambahan pendapatan bagi mereka nanti</p>			
Persepsi Informan	<p>1. Program itu bagus dikarenakan merupakan pemberian bantuan yang tidak tunai kepada masyarakat, adanya produksi melalui pelatihan pembuatan abon ikan tongkol dan kerupuk yang memanfaatkan sumberdaya mangrove, pengembangan usaha kelompok kecil namun masih terkendala</p>	<p>1. Program itu bagus dikarenakan merupakan pemberian bantuan yang tidak tunai kepada masyarakat, adanya produksi melalui pelatihan pembuatan abon ikan tongkol dan kerupuk yang memanfaatkan sumberdaya mangrove, pengembangan usaha kelompok kecil namun masih terkendala pemasaran produk.</p> <p>2. Program itu bagus karena bermanfaat untuk mencegah banjir dari abrasi laut, serta memberi upah ke</p>	<p>Dua informasi tersebut telah divalidasi oleh penulis menggunakan jenis teriangularasi sumber sehingga merupakan fakta yang valid</p>	<p>Program peningkatan fungsi dan jasa ekosistem pesisir terutama kegiatan pemberdayaan yang ada di dalamnya merupakan suatu program yang sangat positif, karena mempunyai manfaat kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung berupa</p>

	<p>pemasaran produk.</p> <p>2. Setidaknya LSM SAR berbuat, banyak program-program penanaman mangrove yang gagal entah karena faktor alam atau karena faktor lingkungan yang kurang mendukung, tapi yang pasti dengan program ini setidaknya LSM SAR sudah berbuat untuk daerah, berbuat untuk bumi, dan untuk manusia.</p> <p>3. Program itu bagus karena bermanfaat untuk mencegah banjir dari abrasi laut, serta memberi upah ke masyarakat karena sebagian besar masyarakatnya sebagai buruh tani dan nelayan hanya sebagian kecil saja</p>	<p>masyarakat karena sebagian besar masyarakatnya sebagai buruh tani dan nelayan hanya sebagian kecil saja</p>		<p>pemberian upah kepada masyarakat, sedangkan manfaat tidak langsung adalah rehabilitasi mangrove disekitar pesisir berpotensi untuk mencegah terjadinya abrasi laut sehingga menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang dan kegiatan pelatihan produksi abon ikan tongkol dan kerupuk kerang namun saat ini masih terkendala pemasaran.</p>
<p>Hambatan Pelaksanaan Program</p>	<p>1. Lokasi mangrove memang lepas pantai ya, dihantam langsung ombak. Kita sudah melakukan beberapa teknik tetapi tetap kalah. Apalagi faktor lumut itu sangat mengganggu dan kita juga tidak memperkirakan ketika</p>	<p>1. Lokasi mangrove memang lepas pantai ya, dihantam langsung ombak. Kita sudah melakukan beberapa teknik tetapi tetap kalah. Apalagi faktor lumut itu sangat mengganggu dan kita juga tidak memperkirakan ketika disitulah lumutnya akan sebanyak itu. Pada waktu itu kan adalah musiman tak pikir tak atasi ketika kita bersihin,</p>	<p>Informasi tersebut telah divalidasi oleh penulis menggunakan jenis teriangularasi sumber sehingga merupakan fakta yang valid</p>	<p>Beberapa hambatan saat pelaksanaan program yakni lokasi mangrove yang berada di lepas pantai mengakibatkan tumbuhan mangrove dihantam ombak langsung, faktor lumut juga mempengaruhi</p>

	<p>disitulah lumutnya akan sebanyak itu. Pada waktu itu kan adalah musiman tak pikir tak atasi ketika kita bersihin, ternyata musimnya tahun ini sama tahun kemarin terus, setiap kita bersihin ada lagi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemancing yang terkadang merusak keberadaan mangrove 3. Hambatannya ya bibit mangrove yang berasal dari luar daerah 4. Hambatannya faktor waktu dan relawan lembaga SAR sedikit sehingga mengalami kesulitan ketika harus melakukan sosialisasi antar individu ke individu lainnya agar lebih efisien untuk membangun kesadaran masyarakat 5. Mangrove sebagian mati karena ditemplei kerang dan jika musim hujan akan banjir dan merusak mangrove 6. Kegiatan pemberdayaan yakni produksi olahan abon ikan tongkol dan kerupuk 	<p>ternyata musimnya tahun ini sama tahun kemarin terus, setiap kita bersihin ada lagi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hambatannya ya bibit mangrove yang berasal dari luar daerah 3. Hambatannya faktor waktu dan relawan lembaga SAR sedikit sehingga mengalami kesulitan ketika harus melakukan sosialisasi antar individu ke individu lainnya agar lebih efisien untuk membangun kesadaran masyarakat 4. Mangrove sebagian mati karena ditemplei kerang dan jika musim hujan akan banjir dan merusak mangrove 5. Kegiatan pemberdayaan yakni produksi olahan abon ikan tongkol dan kerupuk kerang terkendala dana sehingga tersendat dan menunggu hingga dana bantuan cair 6. Sebagian besar mangrove yang ditanam tumbuh bagus, namun ada beberapa yang mati karena dikena kayu dan lumut sebab ombak. Lebih bagus langsung ditanam, kalo program kemarin pembibitan dan hasilnya banyak yang mati karena disini panas dan tidak disiram. 	<p>kondisi mangrove, bibit mangrove yang harus diambil dari luar daerah sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memesan bibit mangrove, beberapa mangrove mati karena ditemplei kerang dan ketika musim hujan mangrove terkena banjir dan merusak mangrove, kegiatan pemberdayaan yakni produksi abon ikan tongkol dan kerupuk kerang tersendat karena dana bantuan yang belum cair, selain itu faktor relawan SAR yang sedikit menyebabkan sulitnya melakukan sosialisasi antar individu ke individu lainnya agar lebih efisien untuk membangun kesadaran masyarakat, beberapa mangrove yang ditanam mati karena dikena kayu dan lumut ketika ombak besar, serta program kemarin penanaman mangrovenya</p>
--	---	---	--

	<p>kerang terkendala dana sehingga tersendat dan menunggu hingga dana bantuan cair</p> <p>7. Itu cuaca bak,, Cuaca laut benar-benar ekstrim kemarin itu sehingga secara logika kita gak bisa mengatasi mengatasi cuaca ekstrim, jadi cuaca faktor alam lah.</p> <p>8. Sebagian besar mangrove yang ditanam tumbuh bagus, namun ada beberapa yang mati karena dikena kayu dan lumut sebab ombak. Lebih bagus langsung ditanam, kalo program kemarin pembibitan dan hasilnya banyak yang mati karena disini panas dan tidak disiram.</p>			<p>melalui pembibitan sehingga hasilnya banyak yang mati karena lokasi penanaman panas dan tidak disiram padahal yang lebih bagus kalo menanam mangrove jika buahnya yang sudah ada langsung ditanam.</p>
Indikator Kesejahteraan nelayan	<p>1. untuk dari mangrove sendiri kewirausahaan masyarakat saat ini belum nampak karena ini masih penanaman dulu, masih proses mbak, ketika sudah mungkin sudah besar kita juga mengarahkan lagi,</p>	<p>1. untuk dari mangrove sendiri kewirausahaan masyarakat saat ini belum nampak karena ini masih penanaman dulu, masih proses mbak, ketika sudah mungkin sudah besar kita juga mengarahkan lagi, mengarahkan bagaimana mangrove ini bermanfaat bagi kehidupan untuk tambahan nilai</p>		<p>Dalam kurun waktu setahun terakhir setelah penanaman mangrove belum terlalu terlihat manfaatnya terhadap kehidupan masyarakat dan membutuhkan waktu untuk benar-benar menilai</p>

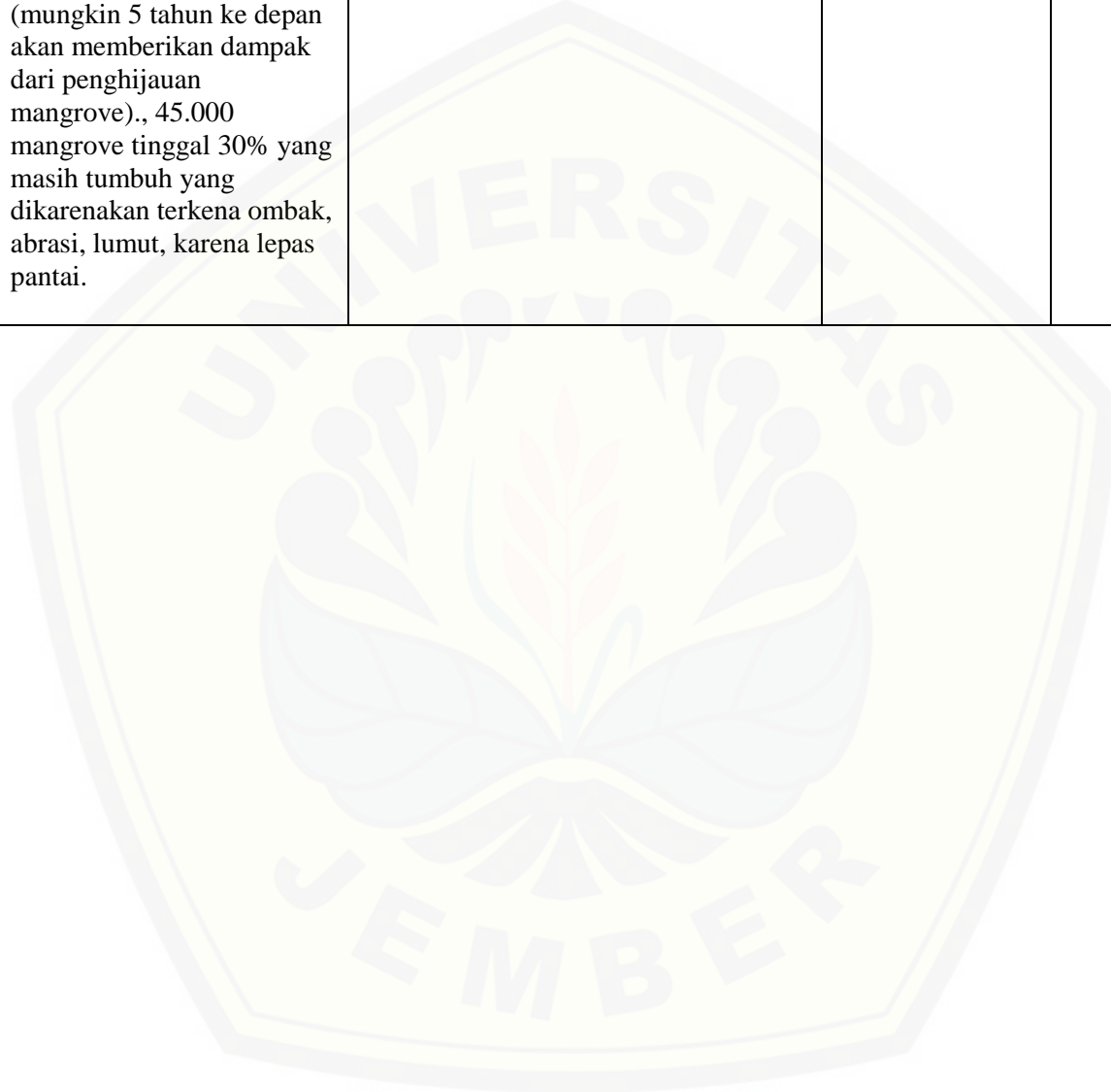
	<p>mengarahkan bagaimana mangrove ini bermanfaat bagi kehidupan untuk tambahan nilai ekonomi mereka. Dari batangnya aja loh jika mereka mau nyari dijual satu buahnya yaitu 50 rupiah kalo dia mau belajar mau aktif istilahnya untuk tambahan ekonomi dari mangrove itu sudah bisa.. Tapi mereka kan kadangka berpikir apasih ini? soalnya tidak ada pengetahuan tidak diberi bimbingan,</p> <p>-Adanya bantuan modal bahan baku kerupuk kerang dan abon ikan tongkol yang dapat dipasarkan di daerah setempat dengan dijual dengan harga minim yang diharapkan wirausaha terus berlanjut, namun masih kurang arahan pemasaran</p> <p>2. Manfaat program terhadap nilai tabungan dan investasi masyarakat belum ada dan butuh waktu untuk mengamati perkembangannya.</p>	<p>ekonomi mereka. Dari batangnya aja loh jika mereka mau nyari dijual satu buahnya yaitu 50 rupiah kalo dia mau belajar mau aktif istilahnya untuk tambahan ekonomi dari mangrove itu sudah bisa.. Tapi mereka kan kadangka berpikir apasih ini? soalnya tidak ada pengetahuan tidak diberi bimbingan,</p> <p>-Adanya bantuan modal bahan baku kerupuk kerang dan abon ikan tongkol yang dapat dipasarkan di daerah setempat dengan dijual dengan harga minim yang diharapkan wirausaha terus berlanjut, akan tetapi masih kurang arahan pemasaran</p> <p>2. Manfaat program terhadap nilai tabungan dan investasi masyarakat belum ada dan butuh waktu untuk mengamati perkembangannya</p> <p>3. Kebutuhan pokok terpenuhi karena ibu-ibu yang ikut program mendapat upah sehingga dapat menambah penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder salah satunya adalah dapat membayar uang sekolah anak sedangkan kebutuhan sekunder lainnya berpotensi terpenuhi juga</p> <p>- sekarang sudah mulai banyak ikan,</p>	<p>manfaat dari penanaman mangrove tersebut untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, beberapa manfaat yang di dapat oleh masyarakat yang berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan mereka yakni kewirausahaan masyarakat misalnya untuk satu batang mangrove dapat dijual seharga 50 rupiah namun dengan catatan mangrove harus terus di pelihara dan adanya bantuan modal bahan baku kerupuk kerang dan abon ikan</p> <p>tongkol yang dapat dipasarkan di daerah setempat dengan dijual dengan harga minim yang diharapkan wirausaha terus berlanjut akan tetapi masih kurang arahan pemasaran, manfaat terhadap nilai tabungan masyarakat dan investasi untuk saat ini masih</p>
--	---	---	---

	<p>3. Kebutuhan pokok terpenuhi karena ibu-ibu yang ikut program mendapat upah sehingga dapat menambah penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder salah satunya adalah dapat membayar uang sekolah anak sedangkan kebutuhan sekunder lainnya berpotensi terpenuhi juga</p> <p>- sekarang sudah mulai banyak ikan, kepiting, dan udang sekitar rehabilitasi mangrove sehingga dapat dijual oleh warga sekitar sini dan bisa dibuat tambahan pendapatan keluarga.</p> <p>4. yaitu mbak,, pengetahuan tentang penghijauan mangrove, sehingga masyarakat tahu tentang penanaman dan dapat membibit yang awalnya pesimis bibit akan hidup -kemarin kita juga buat uji</p>	<p>kepiting, dan udang sekitar rehabilitasi mangrove sehingga dapat dijual oleh warga sekitar sini dan bisa dibuat tambahan pendapatan keluarga</p> <p>4. yaitu mbak,, pengetahuan tentang penghijauan mangrove, sehingga masyarakat tahu tentang penanaman dan dapat membibit yang awalnya pesimis bibit akan hidup</p> <p>- kemarin kita juga buat uji coba kopi mangrove bersama dengan masyarakat Duwet, tapi belum kita lakukan lagi hanya eksperimen kami, kita coba kopi rasa mangrove bukan kopi mangrove tapi ya,, karena itu campuran dari buah mangrove dicampur dengan kopi dan kita coba ternyata nikmat. Tapi itu belum ada hasil labnya karena pendonor kami menyatakan jangan dulu karena dalam program itu kita hanya fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan pembuatan kerupuk kerang dan abon ikan tongkol.</p> <p>5. Kelembagaan ekonomi : Semenjak saya tinggal di pinggir pantai ini belum ada sama sekali mangrove, berhubung belum ada pihak yang mau bergerak,, karena saya memang butuh mangrove untuk melindungi rumah saya yang dipinggir</p>	<p>belum ada dan memang butuh waktu untuk melihat perkembangannya, selain itu juga bermanfaat terhadap sumber daya manusia terutama pemahaman tentang mangrove dan pemanfaatannya sebagai bahan makanan yang aman dikonsumsi misalnya dijadikan campuran kopi, serta tambahan pengetahuan kewirausahaan melalui pelatihan produksi kerupuk dan abon, kelembagaan sosial sudah mulai ada informasi mengenai pentingnya mangrove dan manfaatnya terhadap masyarakat, kebutuhan pokok dan sekunder keluarga terpenuhi terutama ibu-ibu yang berpartisipasi aktif dalam penanam, pembibitan, pemeliharaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>
--	---	--	--

	<p>coba kopi mangrove bersama dengan masyarakat Duwet, tapi belum kita lakukan lagi hanya eksperimen kami, kita coba kopi rasa mangrove bukan kopi mangrove tapi ya,, karena itu campuran dari buah mangrove dicampur dengan kopi dan kita coba ternyata nikmat. Tapi itu belum ada hasil labnya karena pendonor kami menyatakan jangan dulu karena dalam program itu kita hanya fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan pembuatan kerupuk kerang dan abon ikan tongkol.</p> <p>5. Kelembagaan ekonomi : Semenjak saya tinggal di pinggir pantai ini belum ada sama sekali mangrove, berhubung belum ada pihak yang mau bergerak,, karena saya memang butuh mangrove untuk melindungi rumah saya yang dipinggir pantai ini maka saya</p>	<p>pantai ini maka saya melakukan penanaman mangrove di sekitar sini dengan meminjam ke bank Mandiri 8 Juta dengan jaminan BPKB, nah dari itu saya sudah mulai aman karena ada mangrove</p> <p>6. Kelembagaan sosial : mulai ada tiap-tiap pengajian mengenai himbauan pentingnya menanam mangrove di lingkungan mereka</p> <p>7. Hasil penanaman mangrove nantinya sangat bermanfaat selain untuk memperbaiki lahan pesisir yang rusak karena abrasi, juga dapat dijadikan sebagai tambahan pendapatan masyarakat dek.. Sebagai contohnya ya ada mangrove jenis lindur yang buahnya dapat dijadikan tepung dan aman untuk dikonsumsi, buah mangrove bisa juga dibikin agar-agar, dan banyak olahan lainnya dari mangrove</p> <p>-Nelayan mencari ikan jauh, mungkin 5 tahun ke depan akan memberikan manfaat dari penghijauan mangrove., meskipun dari 45.000 mangrove yang ditanam tinggal 30% yang masih tumbuh yang disebabkan terkena ombak, abrasi, lumut, karena lepas pantai</p>		<p>melalui pelatihan produksi olahan hasil mangrove yakni abon ikan tongkol dan kerupuk kerang mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan keluarga mereka, mulai adanya kerang, udang, dan kepiting juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, serta manfaat program ini untuk lingkungan pesisir pantai Pathek adalah selain memperbaiki kerusakan ekosistem pesisir yang diakibatkan oleh abrasi pantai mangrove juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.</p>
--	---	--	--	---

	<p>melakukan penanaman mangrove di sekitar sini dengan meminjam ke bank Mandiri 8 Juta dengan jaminan BPKB, nah dari itu saya sudah mulai aman karena ada mangrove.</p> <p>6. Kelembagaan sosial : mulai ada tiap-tiap pengajian mengenai himbauan pentingnya menanam mangrove di lingkungan mereja.</p> <p>7. Hasil penanaman mangrove nantinya sangat bermanfaat selain untuk memperbaiki lahan pesisir yang rusak karena abrasi, juga dapat dijadikan sebagai tambahan pendapatan masyarakat dek.. Sebagai contohnya ya ada mangrove jenis lindur yang buahnya dapat dijadikan tepung dan aman untuk dikonsumsi, buah mangrove bisa juga dibikin agar-agar, dan banyak olahan lainnya dari mangrove</p> <p>- nelayan mencari ikan jauh</p>			
--	---	--	--	--

	<p>(mungkin 5 tahun ke depan akan memberikan dampak dari penghijauan mangrove)., 45.000 mangrove tinggal 30% yang masih tumbuh yang dikarenakan terkena ombak, abrasi, lumut, karena lepas pantai.</p>			
--	--	--	--	--



LAMPIRAN D. DOKUMENTASI

**DOKUMENTASI PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI DAN JASA
EKOSISTEM PESISIR DI DESA DUWET**



Gambar 1. Persiapan Proses Pembibitan Mangrove



Gambar 2. Proses Pembibitan Mangrove



Gambar 3. Persiapan Lahan Rehabilitasi Mangrove



Gambar 4. Proses Penanaman Bibit Mangrove



Gambar 5. Kondisi Lahan Setelah Penanaman Bibit Mangrove



Gambar 6. Sosialisasi Program dan Pemberian Materi Mengenai Tumbuhan Mangrove serta Manfaatnya



Gambar 7. Kegiatan Pelatihan Produksi Abon Ikan Tongkol
(Sumber: Arsip Lembaga SAR)



Gambar 8. Pelatihan Produksi Kerupuk Kerang
(Sumber: Arsip Lembaga SAR)



Gambar 9. Produk Olahan Hasil Pelatihan Produksi Kerupuk Kerang dan Abon Ikan Tongkol



Gambar 10. Wawancara Dengan Informan Pokok HR Di Lokasi Penanaman Mangrove



Gambar 11. Wawancara Informan Pokok HI



Gambar 12. Wawancara Informan Pokok WY



Gambar 13. Wawancara Informan Tambahan MS



Gambar 14. Wawancara Informan Tambahan NA



Gambar 15. Wawancara Informan Tambahan EK



Gambar 16. Wawancara Informan Tambahan SE

LAMPIRAN E. SURAT IJIN DARI LEMBAGA PENELITIAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.temlit@unej.ac.id

Nomor : 1983/UN25.3.1/LT/2017 28 September 2017
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
Kabupaten Situbondo
di -
SITUBONDO

Memperhatikan surat Pengantar dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 3688/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 22 September 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Fatimatus Zahra / 140910301045
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl. Jawa IIA No 24 Jember / No. HP 082257527908
Judul Penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir (Studi Deskriptif Di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)
Lokasi Penelitian : 1. Kepala Desa Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo
2. Tokoh Agama Setempat
Lama Penelitian : Dua Bulan (28 September – 28 November 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.



NIP 196306161988021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak. ISIP Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173

LAMPIRAN F. SURAT REKOMENDASI DARI BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. PB. SUDIRMAN KEL. PATOKAN TELP/FAX (0338) 671 927
SITUBONDO 68312

Situbondo, 04 Oktober 2017

Nomor : 070/704/431.305.2.2/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada Yth :
Sdr. 1. Kepala Desa **Duwet**
Kecamatan Panarukan
2. Ketua SAR (Shimponi Akar Rumput)
Kabupaten Situbondo
di -

SITUBONDO

Menunjuk surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember, tanggal 28 September 2017 Nomor : 1983/UN25.3.1/LT/2017, perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo tanggal 04 Oktober 2017 Nomor : 070/703/431.305.2.2/2017 atas nama **FATIMATUS ZAHRA** NIM. **140910301045** dengan judul proposal "**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Peningkatan Fungsi Dan Jasa Ekosistem Pesisir (Studi Deskriptif Di Desa **Duwet** Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo**" untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

An. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan



RUDI MULYONO, SP.,M.MA
Periata Tk. I
NIP. 19720627 200112 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. PB. SUDIRMAN TELP. KEL. PATOKAN TELP/FAX. (0338) 671 927

SITUBONDO 68312

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/703/431.305.2.2/2017

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
- Menimbang** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember, tanggal 28 September 2017 Nomor : 1983/UN25.3.1/LT/2017, perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian, atas nama **FATIMATUS ZAHRA NIM. 140910301045.**

Bupati Situbondo, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **FATIMATUS ZAHRA NIM. 140910301045**
b. Alamat /No.Telp : Kp. Bataan RT.01/07 Desa Wringin Anom Kec. Asembagus Situbondo / HP. 082257527908
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organsasi : Universitas Jember
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian / survey / kegiatan dengan :

- a. Tujuan : Penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi)
b. Bidang : Sosial
c. Penanggung Jawab : Arif, S.Sos.,M.AP
d. Anggota/Peserta : -
e. Waktu kegiatan : 04 Oktober s/d 04 November 2017
f. Lokasi Kegiatan : - Desa ^{DURET} Kecamatan Panarukan Situbondo;
- LSM SAR (Shimponi Akar Rumput) Situbondo.

- Dengan ketentuan**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Situbondo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan



RUDI MULYONO, SP.,M.MA

Penata Tk. I

NIP.19720627 200112 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Sdr. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN G. SURAT SELESAI PENELITIAN DARI DESA DUWET
KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN PANARUKAN
DESA DUWET

Jl. Pandowo No. 07 Duwet Panarukan 68351

Panarukan, 18 Januari 2018

Nomor	: 070 /227/431.509.9.7/2018	Kepada	
Sifat	: Penting	Yth.Sdr. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian	
Lampiran	: -	Kepada Masyarakat Universitas Negeri Jember	
Perihal	: PEMBERITAHUAN	Di-	JEMBER

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo tanggal 04 Oktober 2017 Nomor 070/ 704 / 431.305.2.2 / 2017, perihal Rekomendasi permohonan melakukan penelitian/survey/research atas nama.:

Nama / NIM : Fatimatus Zahra / 140910301045
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl. Jawa IIA No. 24 Jember

Dengan ini kami beritahukan bahwa nama tersebut benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian/survey/research di Desa Duwet (sejak tanggal 28 September – 28 Nopember 2017) dengan judul “ Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Peningkatan Fungsi dan Jasa Ekosistem Pesisir.

Adapun pada yang bersangkutan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya pada instansi terkait.

Demikian untuk menjadi periksa atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih



Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
2. Arsip